

Judul: Layanan Bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Wilayah Kota Bandung, Tesis, Program BP-BAK PPs UPI Tahun 2003.

Oleh : Muhdar Mahmud

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan di lapangan yang menunjukkan adanya beberapa Sekolah Dasar yang menghasilkan alumni Anak Berkebutuhan Khusus dengan prestasi yang tidak kalah dengan prestasi teman-teman sebayanya, seperti dua siswa lulusan SD Gegerkalong Girang, seorang siswa lulusan SD BPI, dan dua orang siswa lulusan SD Al-Ghifari. Dari fenomena tersebut muncul permasalahan bagaimana guru memberikan layanan bimbingan dalam memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar, sehingga potensi mereka dapat berkembang secara optimal? Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan program bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus di SD yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan bimbingan bagi mereka di sekolah. Pengetahuan tentang pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh guru dan dengan ditemukannya kendala-kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan bimbingan bagi ABK diharapkan akan memudahkan para perencana dalam mencari alternatif terbaik untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan di sekolah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pelayanan bimbingan kepada ABK, guru tidak membuat satuan layanan bimbingan secara khusus dengan pertimbangan tidak ada pedoman BP khusus untuk ABK, tidak ada contoh satuan layanan bimbingan bagi ABK, berhubungan dengan status kepegawaian, adanya kecenderungan tentang kekeliruan persepsi konsep bimbingan. Program yang dibuat guru meliputi: satuan pelajaran, program catur wulan/semester, program tahunan, program perbaikan, pengayaan, kehadiran, catatan kejadian, kartu komunikasi, kartu pribadi, dan analisis hasil evaluasi pengajaran. Dalam memahami diri ABK, guru mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang kondisi siswa, latar belakang keluarga, dan kondisi sekolah yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan angket dan dilakukan sebelum membuat satuan pelajaran dengan tujuan untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kesulitan dan kebutuhan siswa. Mengenai pemberian bantuan kepada ABK yang mengalami kesulitan belajar bergantung pada tingkat kesukaran yang dihadapi siswa. Jika kesulitandianggap berat, maka sebelum memberikan bantuan guru mengalokasikan kesulitan, mencari faktor penyebab dan alternatif pemecahannya. Bagi kesulitan tahap ringan bantuan diberikan secara spontan dan terpadu dengan KBM biasa. Guru mengevaluasi keberhasilan bantuan, menganalisis dan menindaklanjuti hasil penilaian berupa pengayaan dan pengajaran remedial. Terdapat enam faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan, yaitu: faktor tenaga bimbingan, siswa, orang tua siswa, personil sekolah, sarana dan prasarana. Dengan demikian, pelaksanaan layanan bimbingan bagi ABK di SD belum optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada: guru-guru untuk berusaha mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang bimbingan; Kepala Sekolah untuk melakukan pengembangan personil, sarana, dan prasarana bagi pelaksanaan bimbingan; bagi lembaga yang berwenang agar segera mengadakan kegiatan in-service training mengenai bimbingan dan mengoptimalkan mata kuliah BP di LPTK.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran sistem Pendidikan Luar Biasa (PLB) dari sistem yang segregatif menuju sistem yang lebih integratif tidak dapat dilawan, karena didukung oleh alasan-alasan empiris dan didorong oleh dinamika filosofis, seperti Hak Azasi Manusia atas pendidikan. Perkembangan berpikir manusia yang semakin maju telah mampu merubah sikap dan cara memandang persoalan yang dihadapinya khususnya persoalan Pendidikan Luar Biasa.

Persoalan PLB saat ini tidak lagi mengelompokkan Anak Luar Biasa (ALB) berdasarkan ketunaannya, tetapi mereka dilihat atas dasar kebutuhan dan hambatan belajarnya. Cara pandang seperti ini memberi konsekuensi terhadap perubahan istilah yang digunakan dalam menggambarkan subyek didik.

Pandangan lama menggunakan istilah ALB yang diambil dari istilah *Exceptional Child* mengindikasikan bahwa pendidikan mereka dilayani di sekolah-sekolah luar biasa (SLB). Sementara dalam pandangan baru, istilah yang digunakan adalah anak yang mempunyai kebutuhan khusus (*Children with Special Needs*). Istilah ini muncul karena adanya keberatan atas penggunaan label dan klasifikasi ALB. Keberatan tersebut di antaranya dikemukakan oleh Marozas dan May (1988:164) bahwa *"label mengakibatkan stigma, stereotipe, dan sikap curiga terhadap ALB, dan berpengaruh negatif pada harga diri dan prestasi belajarnya"* Istilah *Children with Special Needs* telah

berhasil membebaskan anak dari label atau stigma kecacatan dan lebih menggambarkan kebutuhannya. Oleh karena itu, layanan pendidikan bagi mereka dilakukan di sekolah-sekolah biasa bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Dengan perkataan lain, pendidikan bagi mereka dilayani di sekolah-sekolah biasa secara inklusif

Sebagai pembaharuan dalam sistem pendidikan, program pendidikan yang inklusif masih dirasakan asing dan kurang familier. Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam proses pelaksanaan pendidikan tersebut. Supriadi (1997:28) mengemukakan bahwa: *"!alun suatu sistem pendidikan baik dalam lingkup makro utuu mikro, ada tiga layanan yang diberikan kepada peserta didik yakni layanan administratif; pengajaran, serta bimbingan dan konseling. Keiigu layunan itu secara lerpada diarahkan guna mencapai tujuan pendidikan.* Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan pengintegrasian berbagai kegiatan atau usaha, salah satunya adalah kegiatan bimbingan. Selanjutnya diungkapkan bahwa:

Jika pengajaran (intruccion) yang tampak paling dominan membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka fungsi bimbingan dan konseling adalah memfasilitasi siswa agar PBM yang diikutinya berjalan lancar. Kendala-kendala psikologis dan nonpsikologis sedapat mungkin dapat ditekan. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai hasil yang balk pula.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 1991 Bab XII Pasal 28 Ayat I dinyatakan bahwa : ***"Bimhingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengatasi masalah yang disebabkan***

oleh kelainan yang disandang, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan ".

Dari pernyataan ini tampak jelas bahwa layanan bimbingan memegang peranan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi masa depannya. Di pihak lain, guru sebagai pengelola inti dalam proses belajar mengajar (PBM) mempunyai tugas untuk melaksanakan layanan bimbingan di sekolahnya, terlepas dari ada atau tidak ada petugas khusus yang disiapkan untuk itu. Peran guru sebagai pembimbing semakin diperkokoh posisinya selaku fasilitator dalam mencapai perkembangan siswa secara optimal. Hal ini selaras dengan tugas pokok guru yang tercantum dalam PP Nomor: 84/P/1993 Bab II pasal 3 tentang Tugas - tugas Pokok Guru yaitu

Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; atau menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari uraian di atas, jelas bahwa guru di sekolah dasar khususnya, di samping merupakan petugas inti pengelola peristiwa belajar mengajar dan pemelancar belajar siswa, juga memegang peranan kunci dan menjadi suatu keharusan bagi guru tersebut untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan bimbingan khususnya dalam proses pembelajarannya.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan guru di sekolah dasar, tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang konselor terlebih konselor bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Dengan demikian, pengetahuan guru tentang Bimbingan dan konseling relatif sedikit. Demikian pula program yang khusus dirancang bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar belum tersedia, sementara siswa yang dihadapi guru sangat memerlukan layanan bimbingan secara khusus, sehingga setiap kebutuhan siswa dapat terpenuhi. Karena itu, guru dalam melaksanakan layanan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus perlu dipertanyakan.

Namun demikian, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa sekolah dasar yang telah menghasilkan alumni anak berkebutuhan khusus dengan prestasi yang tidak kalah dengan prestasi teman-teman sebayanya. Misalnya: dua anak dari SD Gegerkalong Girang, seorang anak dari SD BPI, dan dua anak dari SD Al-Ghifari.

Dari fenomena di atas muncul permasalahan bagaimana guru memberikan layanan bimbingan dalam memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar, sehingga potensi mereka dapat berkembang secara optimal? Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diadakan penelitian.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Masalah yang dijadikan pusat pengamatan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan yang dilakukan guru dalam memenuhi

kebutuhan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar, agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal?. Dan rumusan masalah ini dapat dijabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa yang dilakukan guru dalam menyusun program bimbingan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
2. Apa yang dilakukan guru dalam memahami diri siswa mengenai kebutuhan siswa, kekuatan dan kelemahannya, serta kesulitan yang dihadapi dalam mengikuti PBM di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
3. Apa yang dilakukan guru dalam memberikan bantuan kepada siswa yang menghadapi kesulitan dalam PBM di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
4. Apa yang dilakukan guru dalam mengevaluasi pelaksanaan bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
5. Apa yang dilakukan guru dalam melakukan analisis hasil pelaksanaan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
6. Apa yang dilakukan guru dalam menindaklanjuti program bimbingan yang telah dilaksanakan bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar dan mengapa demikian?
7. Faktor-faktor apa yang menghambat guru dalam melaksanakan bimbingan selama PBM di Sekolah Dasar dan mengapa menjadi penghambat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan program Bimbingan dan Konseling bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar. Untuk itu, diperlukan gambaran yang mendalam tentang pelaksanaan bimbingan dalam PBM pada anak berkebutuhan khusus di SD. Dengan demikian, tujuan tersebut dirinci untuk mengungkap hal-hal yang dilakukan guru dalam:

1. Membuat perencanaan program bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah dasar.
2. Memahami diri anak berkebutuhan khusus mengenai : kebutuhan, kekuatan dan kelemahannya, serta kesulitan yang dihadapi dalam PBM di sekolah dasar.
3. Memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus yang menghadapi kesulitan dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar.
4. Mengevaluasi pelaksanaan bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah dasar.
5. Melakukan analisis hasil pelaksanaan bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah dasar.
6. Menindaklanjuti program bimbingan yang telah dilaksanakan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar.
7. Faktor-faktor yang menghambat guru dalam melaksanakan bimbingan selama PBM di sekolah dasar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan program Bimbingan dan Konseling bagi anak berkebutuhan khusus di SD yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah.

Pengetahuan tentang pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh guru di SD akan memberikan landasan empiris bagi perencanaan peningkatan dalam memantapkan program bimbingan secara keseluruhan.

Ditemukannya kendala-kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan kegiatan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus akan memudahkan para perencana dalam mencari alternatif terbaik untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan di sekolah.

E. Definisi Operasional Permasalahan Penelitian

Untuk memperjelas pemaknaan dari permasalahan penelitian dan menghindari kesalahan dalam penelitian MI, maka dirumuskan definisi operasional permasalahan sebagai berikut.

1. Layanan Bimbingan

Secara formal bimbingan dapat didefinisikan sebagaimana dikemukakan oleh Glanz (1964:5) bahwa *"Guidance may therefore be defined as the process of helping individuals to solve problems and to be free and responsible members of a world community within which they live"*.

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa bimbingan merupakan suatu proses bantuan terhadap individu dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka mampu menciptakan kehidupan yang berarti dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab di lingkungannya.

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, yang dimaksud bimbingan dalam penelitian ini adalah bantuan yang diberikan guru kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar berupa tindakan-tindakan yang dilakukan guru yang meliputi: penyusunan program, pemahaman diri siswa, pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam PBM, pelaksanaan evaluasi, analisis dan tindak lanjut program bimbingan.

2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Lynch (1994:1) mendefinisikan anak yang membutuhkan pendidikan khusus sebagai berikut.

"Children with special educational needs as all those who permanently or temporarily during their school careers have need of special educational responses on the part of the teacher, the institution and/or the system by dint of their physical, mental or multiple impairment or emotional condition or for reasons of situasional disadvantage"

Pernyataan di atas memberikan makna bahwa anak yang membutuhkan pendidikan khusus adalah anak yang secara permanen atau temporer selama jenjang sekolah mereka memerlukan penanganan pendidikan khusus dari pihak guru, institusi, dan/atau sistem sebagai akibat kelainan mereka baik secara fisik,

mental, atau gabungannya, atau kondisi emosi, atau karena alasan situasi yang kurang menguntungkan.

Pengertian anak berkebutuhan khusus dalam penelitian ini merujuk kepada pengertian yang dikemukakan dalam Kebijakan Direktorat Pendidikan Luar Biasa tentang Layanan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Nasichin, 2002:5) adalah mereka yang tergolong luar biasa, baik dalam art] berkelainan, lamban belajar, maupun yang berkesulitan belajar. Berkelainan diartikan sebagai anak yang mengalami kelainan fisik dan atau mental dan atau kelainan perilaku. Kelainan fisik, meliputi tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Kelainan mental meliputi anak tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang. Sedangkan kelainan perilaku meliputi anak tunalaras (PP nomor 72 tahun 1991).

3. Sekolah Dasar

Yang dimaksud dengan Sekolah Dasar dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar umum yang peserta didiknya terdiri dari anak-anak biasa dan anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus yang dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini merujuk kepada keputusan Mendikbud nomor 002/U/1987 Pasal I ayat I yang menggunakan istilah Sekolah Terpadu yang diartikan sebagai model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAB II
LAYANAN BIMBINGAN
BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI SEKOLAH DASAR

A. Konsep Dasar dan Prevalensi Anak Berkebutuhan Khusus

1. Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus

Secara historis, istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus (ABK) mengalami perubahan beberapa kali sesuai dengan paradigma yang diyakini pada saat itu. Perubahan istilah yang dimaksud mulai dari anak cacat, anak tuna, anak berkekurangan, anak luar biasa, atau anak berkelainan sampai menjadi istilah anak berkebutuhan khusus. Perubahan tersebut telah mencerminkan suatu perubahan yang radikal. Kirk (1986:5) mengemukakan bahwa *kekeliruan orang dalam memahami anak-anak ini akan berdampak kepada bagaimana ia melakukan pendidikan bagi mereka*. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang pengertian anak berkebutuhan khusus merupakan dasar yang penting untuk dapat menyelenggarakan layanan bimbingan yang tepat bagi mereka, sehingga perlu dijelaskan siapa sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu.

Di Indonesia, penggunaan istilah-istilah tersebut baru diundangkan secara khusus pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor 4, kemudian disusul dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 dengan istilah anak cacat atau anak tuna, atau anak berkekurangan. Istilah ini hanya merupakan sebagian dari anak luar biasa, karena hanya menggambarkan sesuatu yang hilang atau memang tidak dapat tumbuh dan berkembang sama sekali. Istilah tersebut hanya mencakup anak-anak yang mengalami ketunaan atau kecacatan, seperti anak cacat tubuh,

tunanetra, tunarungu, sebaliknya anak berbakat atau anak yang sangat cerdas tidak termasuk dalam istilah tersebut.

Istilah anak luar biasa yang dalam bahasa asing dikenal dengan istilah "*exceptional Child*" atau berkelainan mencakup semua anak yang mengalami kelainan, sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus. Batasan atau definisi mengenai anak luar biasa banyak dikemukakan oleh para ahli PLB, antara lain: Kirk dan Gallagher (1986:5) mendefinisikan *the exceptional child* sebagai anak yang berbeda dari anak rata-rata atau normal dalam hal (1) karakteristik mental, (2) kemampuan sensori, (3) kemampuan komunikasi, (4) perilaku sosial, atau (5) karakteristik fisik. Perbedaan-perbedaan ini harus sedemikian rupa sehingga anak tersebut memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus untuk mengembangkan kapasitasnya secara maksimum. Hallahan dan Kauffman (1986:5) membuat batasan *exceptional children* adalah anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus yang disebabkan karena mereka mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dari anak-anak pada umumnya dalam satu hal atau lebih berikut: *mentally retarded, gifted, learning disabled, emotionally disturb, physically handicapped*, atau mempunyai gangguan bicara atau bahasa, gangguan pendengaran, atau gangguan penglihatan. Istilah ini dipandang lebih luas ruang lingkupnya daripada istilah sebelumnya, karena bukan saja anak yang berkekurangan atau anak cacat, atau anak tuna, melainkan anak yang memiliki kelebihanpun (*gifted*) namun memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus dapat dikategorikan sebagai anak luar biasa.

Istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah anak berkebutuhan khusus sebagai terjemahan dari istilah "*Children with Special needs*". Istilah ini muncul sebagai akibat adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap anak luar biasa (*Exceptional Children*). Pandangan baru ini meyakini bahwa semua anak luar biasa mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Oleh karena itu semua anak luar biasa baik yang berat maupun yang ringan (tanpa kecuali) harus dididik bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya di tempat yang sama. Dengan perkataan lain anak-anak luar biasa tidak boleh ditolak untuk belajar di sekolah umum yang mereka inginkan. Sistem pendidikan seperti inilah yang disebut dengan pendidikan inklusif. Dalam sistem pendidikan seperti ini digunakan istilah anak berkebutuhan khusus untuk menggantikan istilah anak luar biasa yang mengandung makna bahwa setiap anak mempunyai kebutuhan khusus baik yang permanen maupun yang tidak permanen.

Greenspan dan Wieder (1998:1-2) mengemukakan bahwa secara tradisional "*children with special needs*" ini merupakan istilah yang diambil dari istilah sindrom. Secara umum digunakan untuk memberikan label, antara lain kepada anak-anak autistic, pervasive developmental disorder (PDD), mental retardation dan down syndrome. Greenspan dan Wieder tidak mengemukakan definisi yang jelas untuk anak ini, namun untuk memudahkan para pendidik dalam memberikan bantuan kepada mereka maka digunakan kriteria-kriteria untuk mengidentifikasi apakah seorang anak termasuk special needs atau bukan. Kriteria tersebut dikenal dengan "*The Six Fundamental Developmental Skills*" (1998:4),

yaitu: 1) kemampuan untuk memberikan perhatian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari dunia ini; 2) kemampuan mengadakan hubungan dengan orang lain; 3) kemampuan berkomunikasi dua arah; 4) kemampuan menciptakan gerak isyarat yang kompleks, untuk merangkaikan bersama-sama suatu rangkaian kegiatan ke dalam suatu urutan pemecahan masalah dengan teliti dan disengaja, 5) kemampuan dalam menciptakan ide-ide, dan 6) kemampuan dalam membangun jembatan antara ide-ide dan logika.

Dalam Pernyataan Salamanca diungkapkan bahwa istilah *kebutuhan pendidikan khusus mengacu pada semua anak dan remaja yang kebutuhannya timbul akibat kecacatan dan kesulitan belajarnya (Larsidi, 1994:4)*. Sedangkan Ashman dan Elkins (1994:4-5) mengemukakan bahwa children with special needs meliputi "*exceptional, impairment, disability, dan handicap*". Exceptional menunjuk pada anak-anak yang mempunyai kemampuan dan keterampilan di bawah dan di atas rata-rata. Namun, karena program sekolah yang tidak memungkinkan atau tidak memadai sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh pengalamannya. Impairment, adalah kekurangan atau ketidaknormalan individu baik secara psikologis, fisiologis, maupun struktur atau fungsi anatomis (organic). Disability merupakan keterbatasan untuk melakukan kegiatan yang dipandang normal oleh manusia pada umumnya (fungsi). Sedangkan handicap menunjuk kepada ketidakmampuan individu sebagai akibat dari kondisi impairment atau disability sehingga individu tidak mampu untuk melakukan peran sosial yang sangat esensial (faktor sosial).

Lynch (1994:1) mendefinisikan anak yang membutuhkan pendidikan khusus sebagai berikut.

"Children with special educational needs as all those who permanently or temporarily during their school careers have need of special educational responses on the part of the teacher, the institution and/or the system by dint of their physical, mental or multiple impairment or emotional condition or for reasons of situasional disadvantage"

Pernyataan di atas memberikan makna bahwa anak yang membutuhkan pendidikan khusus adalah anak yang secara permanen atau temporer selama jenjang sekolah mereka memerlukan penanganan pendidikan khusus dari pihak guru, institusi, dan/atau sistem sebagai akibat kelainan mereka baik secara fisik, mental, atau gabungannya, atau kondisi emosi, atau karena alasan situasi yang kurang menguntungkan.

Selanjutnya dikemukakan tiga kategori anak yang membutuhkan pendidikan khusus yaitu: 1) anak yang bersekolah di sekolah umum, tetapi karena berbagai alasan tidak menunjukkan kemajuan yang cukup, 2) anak yang tidak bersekolah di sekolah umum, tetapi dapat mengikutinya apabila sekolah lebih responsif, dan 3) sekelompok kecil anak-anak yang memiliki kelainan fisik, mental yang berat atau keduanya yang kebutuhannya akan pendidikan khusus tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dijelaskan (1994:4) bahwa istilah kebutuhan pendidikan khusus meliputi ketiga kategori di atas termasuk mereka yang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan karena kekurangan gizi, pekerja anak-anak,

kemiskinan, tunadaksa, tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunagrahita, masalah emosi dan kombinasinya.

Sedangkan untuk situasi Indonesia, Kebijakan Direktorat Pendidikan Luar Biasa tentang Layanan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Pendidikan Khusus (Nasichin, 2002:5) mengidentifikasi bahwa peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus ... ***adalah mereka yang tergolong luar biasa, baik dalam arti berkelainan, lamban belajar (slow learner) maupun yang berkesulitan belajar lainnya.***

Selanjutnya PP nomor 72/1991 menyebutkan bahwa

jenis kelainan peserta didik terdiri atas kelainan fisik dan/atau mental dan/atau kelainan perilaku. Kelainan fisik meliputi tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Sedangkan kelainan mental meliputi tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang. Adapun kelainan perilaku meliputi tunalaras. ... Istilah anak berkesulitan belajar secara tegas belum ditetapkan sebagaimana ketentuan di atas.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, jelas bahwa kondisi-kondisi tersebut dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani, rohani, dan atau sosialnya, sehingga mereka tidak dapat mengikuti pendidikan dengan wajar. Dengan perkataan lain, mereka adalah anak-anak yang potensial bermasalah yang apabila mendapat layanan bimbingan secara tepat, potensi mereka akan berkembang secara optimal.

2. Prevalensi Anak Berkebutuhan Khusus

Hasil penelitian Lynch (1994) menyimpulkan bahwa jumlah anak-anak berkebutuhan khusus sulit untuk dihitung secara pasti khususnya di Asia, hal ini disebabkan karena belum adanya tes yang baku untuk mendiagnosa dan mencari indikator-indikator kelainan, kurang lengkapan dalam kajian kependudukan, serta kurangnya kekuasaan pemerintah yang melaporkan data jumlah anak. Selanjutnya, dikemukakan bahwa menurut perkiraan (angka kasar) WHO pada tahun 1979 terdapat sekitar 10% anak-anak berkebutuhan khusus dengan jumlah sekitar 450 juta pada tahun 1980, 500 juta pada tahun 1990, dan lebih dari 600 juta pada akhir abad 20 dan sekitar 40% dari populasi tersebut diperkirakan anak usia sekolah. UNICEP memperkirakan bahwa 140 juta dari anak-anak tersebut hidup di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia). Menurut laporan Depdiknas (Sunanto,2000) hingga saat ini ada 1.278 sekolah yang melayani anak luar biasa dengan jumlah siswa 48.022 anak. Dari jumlah tersebut baru ada 184 sekolah terpadu dengan jumlah siswa kira-kira 961 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah bersama-sama dengan anak normal.

Untuk Indonesia, Nasichin (2001) mengemukakan bahwa angka partisipasi murni (APM) anak usia sekolah 7-15 tahun sudah mencapai 95% dan angka partisipasi kasar (APK) 115% termasuk di dalamnya anak yang membutuhkan pelayanan khusus. Yang tertampung di sekolah kurang lebih 3,7% atau 48.022 anak dari 1,3 juta anak berkebutuhan khusus usia sekolah. Kenyataan

ini menunjukkan bahwa masih sangat kecilnya anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang mendapat pendidikan di sekolah.

B. Konsep Dasar Pendidikan Inklusif

Para ahli PLB meyakini bahwa Pendidikan Luar Biasa bukanlah program pendidikan yang seluruhnya terpisah dan berbeda dari pendidikan biasa. PLB merujuk kepada aspek-aspek yang unik serta berat ringannya kelainan yang disandangnya sebagai tambahan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Makin ringan kelainan yang disandang makin sedikit pelayanan pendidikan luar biasa yang dibutuhkan peserta didik (Amin,1995:162). Bertitik tolak dari pandangan di atas maka tempat dan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diperlukan berbagai alternatif; disesuaikan dengan tingkat kelainan yang disandangnya, melalui sistem terpadu di sekolah biasa.

Secara historis perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus dimulai sejak akhir abad ke 15, yaitu adanya orang pertama seorang biarawan bernama Pedro Ponce de Leon yang mendidik anak tuli. Pada abad ke 17, mulailah orang mendirikan lembaga-lembaga perawatan dan tempat-tempat pendidikan secara khusus. Tahun 1755 berdiri sekolah untuk anak tuli di Paris yang dirintis oleh Abbe Charles Michel de l'Eppe. Tahun 1784 berdiri sekolah untuk anak buta di Paris yang didirikan oleh Valentine Haury. Tahun 1816 berdiri sekolah yang pertama untuk anak tunagrahita di Salzburg. Tahun 1832 berdiri sekolah untuk anak cacat tubuh yang pertama di Munich. Tahun 1901, berdiri sekolah luar biasa

(SLB) untuk anak tunanetra di Bandung. Tahun 1927, berdiri SLB untuk anak tunagrahita di Bandung. Tahun 1930, berdiri SLB untuk anak tunarungu, dan tahun 1952, berdiri Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) di Bandung.

Akhir abad ke 20 muncul gerakan "*Normalisasi*" bukan berarti membuat anak luar biasa menjadi normal, tetapi penyediaan pola dan kondisi kehidupan sehari-hari bagi anak luar biasa sedekat mungkin dengan pola dan kondisi kehidupan masyarakat pada umumnya. Kirk and Gallagher (1986:15) mengungkapkan bahwa *normalisasi adalah menciptakan suatu lingkungan belajar dan lingkungan sosial bagi anak dan orang dewasa luar biasa senormal mungkin*. Sedapat mungkin anak luar biasa harus diintegrasikan ke masyarakat. Anak luar biasa sedini mungkin harus dipersiapkan, dilayani, dan ditempatkan dalam lingkungan kehidupan di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya muncul gerakan-gerakan yang disebut anti labelling, mainstreaming, dan de'institusionalisasi. *Anti labelling* tidak menghendaki anak berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah khusus (SLB). Marozas dan May dalam Sunardi (1995:22) mengemukakan penggunaan label mengakibatkan stigma dan sikap curiga terhadap penyandang cacat, dan berpengaruh negatif pada harga diri dan prestasi belajar anak berkebutuhan khusus.

Mainstreaming, berasal dari kata *mainstream* (masyarakat umum) yang berarti memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak luar biasa untuk memperoleh layanan pendidikan secara bersama-sama dengan teman-teman

normalnya di sekolah umum. Secara definisi telah dikemukakan oleh Kaufman, Gottlieb, Agard, and Kukic (1975,1986:434) bahwa

mainstreaming berkaitan dengan integrasi instruksional dan sosial secara temporal pada anak luar biasa dengan teman-temannya yang normal yang didasarkan pada ketentuan secara individual, perencanaan pendidikan dan proses pemrograman yang memerlukan klarifikasi tanggungjawab di antara para administrator, pengajar dan dukungan personal baik dari pendidikan khusus maupun pendidikan umum.

Kirk and Gallagher (1986:15) mengungkapkan bahwa *mainstreaming adalah suatu proses membawa anak-anak luar hiasu ke dalam kontak kehidupun sehari-huri dengan anak-anak yang bukan luar hiasu dalam suutu selling pendidikan.*

Mainstreaming menghendaki agar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus kembali ke jalur induknya, yaitu sekolah umum (biasa). Pelaksanaan mainstreaming ini berbentuk integrasi atau terpadu baik secara fungsional (penuh), sosial (sebagian), atau lokasional, yaitu integrasi lingkungan fisiknya saja.

Pada dasarnya gerakan *de'instilusionalisasi* pun menghendaki yang sama yaitu tidak menyetujui anak luar biasa untuk dikelompokkan secara khusus dan terus menerus di tempat atau kelompok itu, Mereka akan merasa rendah diri dan tidak dapat mandiri. Karena itu, penyediaan layanan pendidikan bagi mereka hendaknya mulai dari yang paling terbatas (the most restrictive), yaitu pembelajaran di tempat khusus seperti di rumah atau di rumah sakit, sampai kepada yang paling tidak terbatas (the least restrictive), yaitu kelas biasa tanpa

tambahan bimbingan khusus seperti yang digambarkan Deno dalam MacMillan (1982:456). Konsep ini dikenal dengan istilah "*The Least Restrictive Environment (LRL)*", yang saat ini dikenal dengan istilah "*Inclusive Education*" atau *pendidikan inklusif*

Secara bebas pengertian pendidikan inklusif merupakan suatu sistem pembelajaran di sekolah reguler yang peserta didiknya terdiri dari anak biasa dan anak yang memerlukan pendidikan khusus yang dilaksanakan secara bersama-sama. Stout (2001:1) mengemukakan tentang defnisi inklusi sebagai berikut.

Inclusion is a term which expresses commitment to educate each child, to the maximum extent appropriate, in the school and classroom he or she would otherwise attend. It involves bringing the support services to the child (rather than moving the child to the services) and requires only that the child will benefit from being in the class (rather than having to keep up with the other student).

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa inklusi merupakan suatu istilah yang menyatakan komitmen terhadap pendidikan yang sedemikian tepatnya bagi setiap anak, di mana ia akan mengikuti pendidikan baik di sekolah maupun di kelas. Inklusi melibatkan berbagai dukungan layanan terhadap anak dan hanya memerlukan bahwa anak akan mendapat manfaat dari kehidupan di kelas (lebih baik mengalami untuk mengikuti siswa yang lain).

Sapon-Shevin dalam Sunardi (1995:77; 2002:1) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem pelayanan PLB yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Selanjutnya dijelaskan bahwa sekolah yang inklusif

adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para guru agar para murid berhasil. Sekolah yang inklusif merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu antara guru dengan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi. Tarver (1998) mengemukakan bahwa *pendidikan inklusif* adalah suatu keberadaan di mana hanya terdapat satu kesatuan sistem pendidikan formal yang mencakup semua anggota peserta didik memperoleh pelayanan secara wajar tanpa memandang perbedaan status mereka.

Skjorten (2001:38) mengemukakan tentang sekolah yang berorientasi inklusi adalah sebagai berikut.

Inclusive societies (families, kindergartens, schools or classrooms, places of work and the community as a whole) are where: 1) all children and adults are members of the same group, 2) all children have the feeling of belonging and partnership, 3) even if some children may be for various reasons have a need to receive periodical attention outside the classroom

Istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah pendidikan terpadu. Sekalipun ada tiga bentuk keterpaduan yang dapat ditemukan di Indonesia, yaitu keterpaduan antara berbagai jenis keluarbiasaan, keterpaduan antara anak luar biasa dengan anak normal, dan keterpaduan tersamar (sejumlah anak luar biasa yang berada di sekolah-sekolah umum, tetapi tidak memperoleh layanan pendidikan yang layak (Sunardi, 1996:110). Sedangkan yang menjadi pokok

permasalahan di sini adalah keterpaduan antara anak-anak luar biasa dengan anak-anak normal. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mendikbud nomor 002/U/1986 Pasal I ayat I yang mengatakan bahwa *Pendidikan Terpadu ialah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan* (Depdiknas, 2002:4).

Dwidjosumarto (1996:68) mengungkapkan bahwa *sistem pendidikan terpadu adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak luar biasa belajar bersama-sama dengan anak biasa (normal) di sekolah umum*. Sedangkan Bratanata (1974) memberikan istilah pendidikan integrasi yaitu *pendidikan bagi anak berkelainan yang diterima bersama-sama anak normal, dan diselenggarakan di sekolah biasa*. Natanegara (1980) pendidikan terpadu bertujuan *memasukkan anak-anak berkelainan ke sekolah dasar biasa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pendidikan biasa (untuk anak-anak normal)*. Selanjutnya Abdurahman (1996) mengemukakan empat kriteria yang seyogyanya dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan integrasi yaitu:

- 1) mengintegrasikan peserta didik luar biasa dengan peserta didik normal dalam lingkungan belajar, mencakup suatu komitmen dari integrasi lokasi hingga integrasi penuh, 2) mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengembangan potensi yang mencakup kognitif, afektif, psikomotor, dan interaktif, 3) mengintegrasikan hakikat manusia sebagai makhluk sosial ke dalam suatu bentuk strategi pembelajaran; dan 4) mengintegrasikan apa yang dipelajari peserta didik saat ini dengan tugas yang harus diemban di masa mendatang.

Adapun yang menjadi dasar utama pendidikan terpadu sebagaimana dikemukakan dalam The Salamanca Statement tentang pendidikan inklusif (Skjorten, 2001: 39) bahwa:

- The right of all children, including those with temporary and permanent needs for educational adjustments to attend school
- The right of all children to attend school in their home community in inclusive classes
- The right of all children to participate in a child centered education meeting individual needs
- The enrichment and benefits all those involved will derive through the implementation of inclusive education
- The right of all children to participate in a quality education that is meaningful for each individual
- The believe that inclusive education will lead to an inclusive society and ultimately to cost effectiveness.

Sedangkan Sunanto (2000:4) mengemukakan bahwa yang menjadi dasar utama pendidikan inklusif adalah:

1) semua anak mempunyai hak untuk belajar bersama; 2) anak-anak tidak harus diperlakukan diskriminatif dengan dipisahkan dari kelompok lain karena kecacatannya; 3) para penyandang cacat yang telah lobs dari pendidikan segregasi menuntut segera diakhirinya sistese segregasi; 4) tak ada alasan yang legal untuk memisahkan pendidikan bag] anak cacat, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing; 5) banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi akademik dan sosial anak cacat yang sekolah di sekolah integrasi lebih baik dari pada di sekolah segregasi; 6) tidak ada pengajaran di sekolah segregasi yang tidak dapat dilakukan di sekolah umum; 7) dengan komittmen dan dukungan yang baik, pendidikan inklusi lebih efisien dalam penggunaan sumber belajar; 8) sistem segregasi dapat membuat anak menjadi banyak prasangka dan rasa cemas (tidak nyaman); 9) semua anak memerlukan pendidikan yang membantu mereka berkembang untuk hidup dalam masyarakat yang normal; 10) hanya sistem inklusilah yang berpotensi untuk mengurangi rasa kekhawatiran, membangun rasa persahabatan, saling menghargai dan memahami.

Dan pernyataan-pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa sekolah reguler yang berorientasi inklusi merupakan alat untuk memerangi sikap diskriminasi,

menciptakan masyarakat yang ramah, mencapai pendidikan bagi semua, sehingga akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi karena akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan.

Menurut Keputusan Mendikbud Nomor 0491/U/1992 dijelaskan bahwa

melalui pendidikan terpadu para peserta didik dimungkinkan untuk: 1) saling menyesuaikan diri; 2) saling belajar tentang sikap, perilaku, dan keterampilan; 3) saling berimitasi dan mengidentifikasi; 4) menghilangkan sifat menyendiri, 5) menimbulkan sikap saling percaya, 6) meningkatkan motivasi belajar; dan 7) meningkatkan harkat dan harga diri.

Tarver (1994) mengungkapkan beberapa keuntungan sistem pendidikan inklusi (terpadu) baik bagi anak luar biasa dan orang tuanya maupun bagi anak biasa, antara lain:

Bagi anak luar biasa: 1) mereka merasa diakui kesamaan haknya dengan anak biasa; 2) dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya secara optimal; 3) mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; 4) harga diri mereka meningkat dan dapat menumbuhkan motivasi belajar, karena ia harus bersaing dengan anak biasa. Bagi anak biasa: 1) mereka mengenal lebih dekat siapa anak luar biasa itu, sehingga mereka terhindar dari anggapan yang salah tentang anak luar biasa; 2) menjadi pemicu bagi peningkatan prestasi belajarnya; 3) mengembangkan rasa solidaritas mereka. Bagi orang tua anak luar biasa, mereka merasa bangga, harga dirinya meningkat karena anaknya sekolah di sekolah umum.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan terpadu bertujuan

untuk memberikan layanan kepada peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus agar potensi yang dimiliki (kognitif, psikomotorik, dan sikap) dapat berkembang secara optimal dan mereka dapat hidup mandiri sesuai dengan prinsip pendidikan (Depdiknas, 2002:2).

Dan berbagai pendapat di atas, pendidikan terpadu merupakan salah satu upaya dalam memberikan layanan pendidikan yang efektif dan efisien bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal.

C. Petugas Layanan Bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar

Dengan kondisi peserta didik seperti yang diuraikan di atas, diperlukan tenaga kependidikan yang berkompeten. Salah satu di antaranya adalah tenaga bimbingan yang mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga peserta didik merasa nyaman di lingkungan sekolah dan mampu mengatasi kesulitan dalam PBM nya. Supriadi (1997) membedakan tiga istilah pembimbing sesuai dengan fungsinya, yaitu. 1) *guru pembimbing (teacher-counselor)*, 2) *pembimbing-guru (counselor-teacher)*, dan 3) *pembimbing penuh (full counselor)*.

1) guru-pembimbing (teacher-counselor) yang tugas utamanya mengajar (guru), tetapi melakukan fungsi-fungsi bimbingan; 2) pembimbing-guru (counselor-teacher), yaitu pembimbing yang melaksanakan tugas keguruan/pengajaran. Secara akademik mereka dipersiapkan sebagai tenaga bimbingan; dan 3) pembimbing penuh (full counselor) adalah mereka yang secara khusus disiapkan untuk menjadi tenaga bimbingan. Sehubungan dengan ini PP Nomor 72 tahun 1991, Bab XII pasal 28 mengungkapkan bahwa *bimbingan bagi anak luar biasa diberikan oleh guru pembimbing*.

Dalam rangka melakukan fungsinya sebagai pembimbing, guru pembimbing diharapkan memiliki sejumlah sikap yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Darajat (1982:45-46) mengemukakan beberapa sikap yang seyogyanya dimiliki oleh seorang konselor pendidikan, di antaranya adalah mampu: *menciptakan, menumbuhhkan rasa hangar dan ramah supaya dapat diciplakan huhungan yang haik, menerima anak dengan sungguh-sungguh, mengetahui perasaan anak, pemaaf ' dan pemurah kepada anak, tetap menghargai anak, dan memheri kehehasan kepada anak.*

Johnsen dan Skjorten (2001:311) mengemukakan syarat minimal kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru spesialis (Ind.:GPK) di Sekolah Dasar, yaitu:

- 1) Philosophical, historical, and legal foundation of special education,
- 2) characteristics of learners, 3) assessment, diagnosis and evaluation;
- 4) instructional content and practice, 5) planning and managing the teaching and learning environment; 6) managing studnt behavior and social interaction skills, 7) communication and collaborative partnerships; 8) professionalism and ethical practices.

Pernyataan di atas memberikan makna bahwa kualifikasi guru pembimbing khusus yang diharapkan adalah: 1) memahami pendidikan luar biasa ditinjau dari segi filosofis, historis, maupun peraturan-peraturan resmi yang mendasarinya; 2) karakteristik-karakteristik siswa; 3) asesmen, diagnosis, dan evaluasi; 4) materi dan proses belajar mengajar; 5) perencanaan dan pengelolaan lingkungan belajar mengajar; 6) keterampilan dalam mengelola perilaku siswa dan

interaksi sosial; 7) komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi; dan 8) profesionalisme serta etika pelaksanaannya.

Secara rinci Tarver dkk.(1998:52-55) mengemukakan peranan konselor dalam pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, adalah: 1) *mengadakan kolaborasi dan konsultasi*, 2) *membina penyesuaian emosi dan sosial*, 3) *memberikan layanan konseling secara langsung*, 4) *mengadakan konsultasi dengan keluarga*, dan 5) *membantu guru-guru herkolaborasi dengan orang tua*.

Dalam mengadakan kolaborasi dan konsultasi, konselor memainkan peranan yang unik sebagai konsultan bagi guru-guru. Konselor membantu guru-guru dalam menemukan kebutuhan siswa, memudahkan penyesuaian akademik, dan sosial siswa. Dalam konteks ini konselor sekolah harus berkolaborasi dengan guru SLB dan guru sekolah biasa dan mempertemukan mereka untuk menemukan topik dan keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada siswa. Konselor harus dapat membantu guru-guru dalam berkolaborasi dengan orang tua.

Pembinaan penyesuaian emosi dan sosial, merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan sejumlah tantangan sosial yang dialami anak berkebutuhan khusus yang memasuki kelas pendidikan umum antara lain: 1) anak berkebutuhan khusus karena datang dari lingkungan sosial yang miskin, mengakibatkan anak mengalami gangguan belajar atau gangguan emosi yang serius; 2) perbedaan fisik yang secara jelas bagi anak berkebutuhan khusus, mengakibatkan penolakan atau pemisahan sosial; 3) adanya kecacatan yang

dialami anak berkebutuhan khusus mengakibatkan is sendiri merasa tidak sesuai dengan sikap-sikap dari teman-teman yang lain; 4) kurangnya pengalaman dengan teman-teman sebayanya dalam pendidikan umum karena mereka berada di kelas pendidikan khusus, sehingga untuk memperoleh keterampilan-keterampilan sosial dengan teman-teman seusianya sangat terbatas (Tarver,1998). Sementara itu, tujuan utama dari pendidikan inklusif adalah meningkatkan kompetensi sosial anak berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya di lingkungan pendidikan umum.

Dengan demikian, seorang konselor harus mampu membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru-guru tentang penyesuaian emosi dan sosial anak berkebutuhan khusus, meningkatkan perasaan memiliki pada anak berkebutuhan khusus, menentramkan para guru tentang manfaat yang positif dari pendidikan inklusif, serta menciptakan perasaan aman bagi semua anak melalui pembentukan dasar-dasar komunikasi kelas.

Konselor dapat memberikan layanan konseling secara langsung kepada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan , baik secara individual maupun kelompok. Konselor sekolah juga harus mengadakan konsultasi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan para orang tua atau keluarga. Konselor dapat menginformasikan manfaat pendidikan terpadu, menjelaskan persiapan guru sekolah biasa dengan strategi pengajaran, program perilaku dan sosial yang sesuai dalam penempatan untuk memudahkan penyesuaian siswa, memonitor kemajuan siswa melalui team antara konselor dan guru SLB.

Di Indonesia, dikenal istilah *Guru Pembimbing Khusus disingkat GPK* (Depdikbud, 1983/1984). Secara historis GPK ini lahir dari Perintisan Pelaksanaan Program Pendidikan Terpadu bagi Anak Tunanetra atas perjanjian kerjasama pemerintah Indonesia dengan Helen Keller International Incorporated (HKI,Inc.) di New York USA pada tanggal 8 September 1977. Untuk ini, ditatarlah 33 orang guru alumni Sekolah Guru pendidikan Luar Biasa (SGPLB) untuk menjadi GPK bagi Anak Tunanetra di Sekolah Terpadu (1979-1980). Uji coba hasil perintisan tersebut dilakukan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya melalui penelitian Balitbang Dikbud tahun 1984 dan dinyatakan berhasil. Berdasarkan hasil penelitian itulah muncul SK Mendikbud nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Luar Biasa. Sejak itulah GPK tidak lagi hanya milik anak tunanetra, melainkan milik semua anak luar biasa, dan untuk saat ini menjadi milik semua anak berkebutuhan khusus, sekalipun pada saat itu status GPK belum jelas.

Berdasarkan Kebijakan Direktorat PLB tentang Layanan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan Berkesulitan Belajar tahun 2002, dijelaskan bahwa *Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan khusus tentang pendidikan luar biasa* (Nasichin, 2002:15). Selanjutnya dijelaskan bahwa tugas GPK antara lain:

- a) menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus merasa nyaman di lingkungan sekolah;
- b) memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan kebutuhan

pendidikan khusus, sehingga dia mampu mengatasi kesulitannya dalam belajar; c) memberikan bantuan kepada guru kelas/guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus; dan d) melaksanakan administrasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan kedudukan GPK ditinjau dari status kepegawaiannya mereka adalah: 1) guru SLB/SDLB negeri atau swasta yang berkedudukan di SLB/SDLB tempat dia mengajar. Atasan langsung yang bertanggung jawab terhadap pembinaan GPK adalah Kepala SLB/SDLB basis. GPK dapat melayani beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi; dan 2) guru yang berlatar belakang PLB dan berkedudukan sebagai guru SD reguler berdasarkan pengangkatan pejabat yang berwenang. GPK dapat melayani beberapa sekolah inklusi di wilayah kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jumlah dan jenis kelainan anak. Idealnya setiap SD/sekolah penyelenggara program pendidikan terpadu tersedia seorang GPK.

D. Hakikat Bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar

Menggaris bawahi Keputusan Mendikbud Nomor 002/U/1986 yaitu *menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan*, maka Bimbingan dan Konseling bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah terpadu khususnya di sekolah dasar dilaksanakan dengan berdasar pada Pedoman Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan *"secara organisatoris, kedudukan sekolah inklusif (terpadu) sama dengan sekolah reguler biasa"* (Nasichin, 2002:6).

Dalam PP Nomor 29 tahun 1990 pasal 27, dikemukakan bahwa *bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan* (Depdikbud.,1994:1).

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi dimaksudkan agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahannya sendiri, serta menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan agar peserta didik mengenal secara obyektif baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, dan menerima berbagai kondisi lingkungan secara positif dan dinamis pula. Pengenalan lingkungan meliputi lingkungan rumah,sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, sehingga diharapkan dapat menunjang proses penyesuaian diri peserta didik, serta dapat dimanfaatkan sebesar-besar untuk pengembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Sedangkan bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan dimaksudkan agar peserta didik mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depan dirinya, baik yang menyangkut pendidikan, karir, maupun budaya, keluarga, dan masyarakat.

Secara umum tujuan bimbingan mengacu kepada tujuan pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam kebijakan Direktorat PLB tentang layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (Depdiknas,2002:2).

Langkah awal dalam melaksanakan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus adalah melakukan identifikasi anak. Untuk menghimpun informasi yang

lengkap mengenai kondisi anak dalam rangka penyusunan program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka identifikasi perlu dilakukan oleh GPK dan jika memungkinkan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan tenaga profesional dalam menangani anak yang bersangkutan.

Dalam upaya pelaksanaan bimbingan bagi anak yang berkebutuhan khusus, maka *identifikasi dilakukan untuk keperluan penjarangan, pengalihan, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar* (Nasichin, 2002:6-8).

Dalam rangka mengetahui apakah GPK berhasil dalam melaksanakan bimbingan di sekolah dasar, maka perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kemajuan dan kemunduran belajar peserta didik baik ditinjau dari materi yang diberikan, pendekatan yang dipilih GPK, maupun program yang telah disusun. Dengan demikian diharapkan semua permasalahan dapat diatasi sehingga peserta didik terhindar dari kemungkinan tidak naik kelas atau bahkan putus sekolah.

E. Temuan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa temuan penelitian terdahulu tentang pendidikan inklusif di antaranya, adalah:

Penelitian dokumentasi dan Studi Kasus dari 15 negara di Wilayah Asia tentang anak berkebutuhan khusus yang dilaporkan oleh James Linch (1994). Penelitian tersebut menyoroti perkembangan berbagai model pendidikan dasar

yang lebih inklusif yang mampu melibatkan sebagian besar anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Umum. Perkiraan persentase total penduduk yang menderita kelainan (anak dan dewasa) di wilayah Asia, berkisar antara 0,1% sampai 13%. Estimasi terakhir jumlah populasi anak yang termasuk kategori membutuhkan pendidikan khusus, berkisar antara 5% sampai 7%. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa provisi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di wilayah Asia telah meningkat atau mengalami kemajuan, terlepas dari apakah mereka telah mencapai Universal Primary Education (UPE) atau tidak. Hampir di semua negara di Asia layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, diprakarsai oleh pihak swasta terutama oleh para misionaris agama.

Salah satu penelitian di Denmark tahun 1989 (Pijl, 1997:143) tentang di mana dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan terpadu (integrasi). Penelitian tersebut dilakukan pada 200 siswa lebih yang mengalami kesulitan belajar yang berat (severe learning disabilities) dengan IQ antara 45 - 65. Untuk pelajaran bernyanyi, perkayuan, menjahit, olah raga, dan agama 90 persen murid-murid secara penuh berintegrasi dengan yang normal; arithmatic hanya 57 persen; bahasa (Denmark) 47 persen; bahasa Inggris 34 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa untuk mata pelajaran non akademik (keterampilan) siswa berkebutuhan khusus (yang mengalami kesulitan tingkat berat atau severe) dapat mengikuti pelajaran secara penuh di sekolah reguler dengan kurikulum yang sama sebagaimana teman-teman mereka. Sedangkan untuk mata pelajaran akademik

(aritmetik dan bahasa) hanya sebagian saja dapat diintegrasikan dengan anak-anak pada umumnya.

Tinjauan meta analisis yang dilakukan Lloyd tahun 1999 menyimpulkan bahwa kelas terbuka atau nongradasi tidak merugikan prestasi akademik anak-anak berbakat, bahkan kelas-kelas ini memiliki keunggulan non akademis seperti kemandirian, sosialisasi, harga diri, keterbukaan, kerjasama, sikap terhadap sekolah, dan motivasi. Bagi anak-anak unggul, bahkan direkomendasikan agar tidak dikelompokkan dalam kelas homogen, karena secara akademik merugikan (Sunardi, 2002:9).

Kelas terbuka atau nongradasi adalah kelas yang terdiri dari berbagai anak yang berbeda baik usia maupun potensinya. Di sini, setiap anak dianggap sebagai bagian dari kelas tersebut bukan bagian dari tingkat tertentu, kemajuan anak bergantung kepada perkembangan dan potensi individu anak.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan program bimbingan dan konseling bagi ABK di SD. Untuk itu diperlukan gambaran yang mendalam tentang pelaksanaan bimbingan dalam PBM pada siswa berkebutuhan khusus di SD. Untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pertimbangan bahwa: 1) data yang dikumpulkan bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata, dan tindakan-tindakan subjek yang diamati atau yang diwawancarai; 2) penelitian ini memberikan gambaran apa adanya mengenai layanan bimbingan yang dilakukan oleh guru kepada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar, 3) penelitian ini bermaksud untuk melacak peristiwa-peristiwa yang alami yang tidak dapat dimanipulasi. Artinya peristiwa-peristiwa tersebut berlangsung sebagaimana adanya, peneliti tidak mengubah keadaan atau melakukan intervensi terhadap penelitian; 4) aspek-aspek di atas dapat dipelajari secara mendalam, menyeluruh, terinci, dan bersifat pribadi yang relatif berbeda antara guru yang satu dengan yang lainnya.

B. Lokasi dan Sumber Informasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di enam SD wilayah Kota Bandung. Dipilihnya SD tersebut sebagai lokasi penelitian mengingat sekolah ini

merupakan lembaga pendidikan yang menampung anak berkebutuhan khusus di samping anak pada umumnya, sehingga sekolah tersebut telah melaksanakan layanan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus.

Sumber informasi dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu teknik pengambilan responden yang didasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti atas dasar sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan responden ini, adalah bahwa responden pernah atau sedang membimbing anak berkebutuhan khusus di sekolah tempat tugasnya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dalam tahap orientasi ke lapangan, diperoleh responden sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel I
RESPONDEN PENELITIAN

No	Nama SD	Jumlah	
		Guru	Siswa
1.	SD Tunas Harapan, An. Cijerah 61	1	2
2.	SD Gegerkalong Girang III, Jln.Geger Arum	3	6
3.	SD Al-Ghifari, Jln.Cisaranten 40	6	12
4.	SD BPI, JIn.Halimun 40	4	5
5.	SD Advent, JIn.Naripan 91 Bandung	4	4
6.	SD Panorama III	4	4
	Jumlah	22	33

Dengan responden yang demikian diharapkan dapat mempertinggi ketelitian dalam arti menekan atau mengurangi peluang untuk terjadinya

ketidaktercermatan penelitian baik yang menyangkut pengumpulan data, pengolahan, maupun analisis data, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan. Dengan perkataan lain, kesimpulan yang diambil menjadi lebih akurat. Sehubungan dengan ini], Hadisubroto (1988:2) mengemukakan bahwa: *"penelitian kualitatif tidak akan mulai dengan menghilang proporsi sampelnya, sehingga dipandang telah representatif"*.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data ini, teknik yang digunakan adalah angket, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

1. **Angket**

Angket ini] digunakan dalam rangka studi pendahuluan untuk memperoleh kejelasan tentang fokus permasalahan, sehingga dapat membantu memudahkan pengumpulan data baik melalui wawancara maupun observasi sebagai alat pengumpul data utama dalam penelitian ini. Angket ini merupakan perangkat pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden (guru) secara tertulis pula. Hal-hal yang ditanyakan dalam angket ini meliputi identitas responden dan pengalaman responden dalam memberikan layanan bimbingan di sekolah.

2. **Wawancara**

Wawancara dilakukan terhadap responden baik guru maupun siswa. Teknik ini digunakan dalam bentuk tanya jawab langsung dengan responden (guru) untuk memperoleh informasi secara terinci dan mendalam tentang

bagaimana responden memberikan layanan bimbingan dalam PBM kepada anak berkebutuhan khusus, dan faktor-faktor penghambat yang dihadapinya pada saat melaksanakan bimbingan selama PBM. Hal-hal yang ditanyakan melalui wawancara meliputi: perencanaan program bimbingan; bagaimana guru memahami diri anak berkebutuhan khusus mengenai : kebutuhan, kekuatan dan kelemahannya, serta kesulitan yang dihadapi dalam belajar; bagaimana guru memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus yang menghadapi kesulitan dalam proses belajar mengajar; bagaimana guru mengevaluasi pelaksanaan bimbingan; bagaimana guru melakukan analisis hasil pelaksanaan bimbingan; bagaimana guru menindaklanjuti program bimbingan yang telah dilaksanakan; faktor-faktor yang mendukung dan menghambat guru dalam melaksanakan bimbingan selama PBM.

Adapun wawancara dengan siswa bermaksud untuk memperoleh informasi tentang bagaimana prestasi dan suasana hati] siswa selama mengikuti PBM di sekolah. Prestasi yang dimaksud adalah hasil belajar yang diperoleh anak berkebutuhan khusus pada semua bidang pelajaran yang diikuti di sekolah baik prestasi harian maupun prestasi kumulatif. Yang ditanyakan mengenai suasana hati siswa, adalah hal-hal yang dirasakan siswa yang meliputi: perasaan takut, malu, cemas, khawatir, suka, duka, senang atau gembira selama anak berkebutuhan khusus mengikuti pelajaran di sekolah.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas (tidak berstruktur). Sejalan dengan ini Nasution (1996:72) mengemukakan bahwa

dengan wawancara tak berstruktur responden mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengemukakan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti.

3. **Observasi**

Teknik ini digunakan untuk mengamati dan mencatat secara cermat perilaku responden baik pada saat mengadakan wawancara maupun pada saat membimbing siswa berkebutuhan khusus selama PBM di kelas dan di luar kelas. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh melalui wawancara. Di samping itu peneliti ingin memperoleh data yang lebih akurat mengenai kegiatan layanan bimbingan yang dilaksanakan guru dalam PBM di SD. Sudjana dan Ibrahim (1989:109) mengemukakan keuntungan penggunaan teknik observasi sebagai berikut.

"melalui observasi atau pengamatan dapat diketahui sikap dan perilaku individu, kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, tingkal partisipasi dalam suatu kegiatan, proses kegiatan yang dilakukannya, kemampuan, bahkan hasil yang diperoleh dari kegiatannya".

Di samping beberapa pertimbangan di atas, dalam melakukan observasi, peneliti memiliki kesempatan untuk memahami secara lebih jelas dan rinci tentang kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dalam PBM di SD.

4. *Studi Dokumentasi*

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang program-program kegiatan bimbingan yang telah dibuat oleh para guru. Perolehan data melalui dokumen yang relevan sangat membantu di dalam melengkapi data yang mungkin tidak atau sulit diungkap melalui wawancara, observasi, dan angket. Moleong (1989:77) mengungkapkan bahwa *data yang diperoleh dari dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menajsrkan, bahkan meramalkan*. Dengan demikian, melalui analisis dokumen peneliti akan dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu perbedaan dan persamaan antara hasil observasi dan wawancara dengan hasil-hasil yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Bila terjadi perbedaan peneliti dapat mengkonfirmasikannya melalui wawancara dengan responden. Dokumen yang dikumpulkan meliputi buku-buku pedoman bimbingan, program-program layanan bimbingan, alat-alat pengumpul dan penyimpanan data, serta perlengkapan administrasi layanan bimbingan yang meliputi buku laporan kemajuan siswa.

Berkaitan dengan fokus masalah yang menyangkut tindakan-tindakan yang dilakukan guru mengenai layanan bimbingan dalam PBM di SD, maka keempat teknik di atas menjadi penting artinya, karena untuk mengungkap aspek-aspek tersebut akan ditunjukkan melalui respon-respon dari stimulus yang diberikan. Hal ini baru dapat dicapai dan tepat sasaran apabila adanya panduan yang memungkinkan untuk mengungkap hal itu sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Panduan-panduan yang digunakan dalam penelitian ini

dikembangkan sendiri oleh peneliti berupa key instrumen atau alat penelitian utama. Panduan-panduan tersebut disusun sebelum ke lapangan, dan sebelum digunakan, terlebih dahulu peneliti mengajukannya kepada pembimbing penulisan tesis dan mengalami beberapa perbaikan, baru kemudian mendapat persetujuan dari beliau. Keempat panduan tersebut memuat aspek-aspek secara garis besar dan tiap-tiap pokok permasalahan yang kemudian dikembangkan selama berada di lapangan.

Selama proses pengumpulan data berkembang beberapa panduan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat itu. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian menjadi ciri khas dalam penelitian kualitatif yang sifatnya komunikatif interaktif antara peneliti dengan yang diteliti. Artinya hanya peneliti yang dapat memahami makna interaksi, membaca ekspresi wajah, menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan responden. Cara ini memungkinkan data penelitian dapat digali sedalam mungkin seperti apa yang dikemukakan oleh Nasution (1996:102) bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang di lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan lingkungannya. Lebih lanjut Nasution (1996:55-56) menunjukkan kelebihan-kelebihan manusia sebagai instrumen penelitian sebagai berikut: 1) peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti, 2) dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data

sekaligus, 3) tiap situasi merupakan suatu keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. Hanya manusia sebagai instrumen dapat memahami situasi dalam segala seluk beluknya, 4) suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata-mata. Untuk memahaminya kita sering merasakannya dan menyelaminya berdasarkan penghayatan kita, 5) dapat segera menganalisis data yang [diperoleh. Ia](#) dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesa dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, dan untuk mengetes hipotesa yang timbul seketika, 6) dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul pada suatu saat dan segera menggunakannya sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, peruaikan atau penolakan, serta 7) dapat memperhatikan responden yang aneh atau menyimpang, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diselidiki.

D. Prosedur Penelitian

Secara garis besar prosedur dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu:

1) tahap orientasi, 2) tahap eksplorasi, serta 3) tahap perolehan tingkat kepercayaan hasil penelitian.

1. Tahap Orientasi

Tahap orientasi merupakan tahap awal dalam penelitian ini. Dua hal yang menjadi sasaran peneliti pada tahap ini yaitu untuk mendapatkan ijin penelitian

dari pihak sekolah dan untuk mendapatkan gambaran umum tentang keadaan sekolah serta proses pelayanan bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus. Pada tahap ini peneliti meminta izin kepada Kepala Sekolah untuk mengadakan penelitian di SD dan menanyakan tentang petugas layanan bimbingan serta sarana layanan bimbingan di SD. Sebagai penjangkauan peneliti menyebarkan seperangkat daftar pertanyaan yang harus diisi oleh calon responden. Semuanya ini dilakukan dalam rangka memperjelas fokus penelitian dan penentuan subjek penelitian. Di samping itu, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. ***Tahap Eksplorasi***

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada upaya pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk kelancaran proses pengumpulan data ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan rambu-rambu pedoman wawancara, observasi dan studi dokumentasi, serta mengurus surat izin penelitian.

Berdasar pada surat Direktur Program Pascasarjana UPI kepada enam Kepala Sekolah Dasar wilayah Kota Bandung yang ditunjuk sebagai responden penelitian, maka diperoleh kesempatan untuk melakukan wawancara dan observasi maupun studi dokumentasi sebagai upaya menjangkau data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pelaksanaan pengumpulan data dimulai sejak bulan Agustus 2003 dan berakhir pada bulan Nopember 2003. Kegiatan wawancara ditujukan kepada guru-guru dan siswa berkebutuhan khusus. Informasi yang diperoleh melalui wawancara baik data verbal maupun data non-verbal seperti perasaan yang tercermin di wajah responden dicatat dalam buku catatan lapangan. Di samping itu dalam buku catatan lapangan dapat ditambahkan komentar tentang kemungkinan-kemungkinan informasi yang belum jelas dari responden.

Pelaksanaan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan responden. Kegiatan observasi difokuskan pada tindakan-tindakan guru dalam memberikan layanan bimbingan pada siswa dalam PBM di kelas. Kegiatan studi dokumentasi difokuskan pada program-program kegiatan bimbingan yang telah dibuat oleh guru.

Pencatatan hasil observasi ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu: bentuk deskripsi dan bentuk check list. Dalam kedua bentuk ini dicatat hal-hal yang nyata-nyata ada dalam pengamatan. Adapun hasil studi dokumentasi dibuat deskripsi singkat dan dianalisis kemudian apabila terjadi pertentangan peneliti mengkonfirmasikannya melalui wawancara dengan responden. Dengan penggunaan ketiga teknik pengumpulan data di atas peneliti mengharapkan data yang diperoleh benar-benar valid dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau apa adanya.

3. ***Tahap Perolehan Tingkat Kepercayaan Hasil Penelitian***

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Untuk itu setiap memperoleh data selalu diupayakan pemeriksaan kebenarannya. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu: *kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas* (Nasution, 1996:114).

Untuk mencapai kredibilitas, peneliti mengadakan: 1) pengamatan yang terus menerus (kontinyu), sehingga peneliti dapat memperhatikan sesuatu secara lebih cermat, terinci, dan mendalam; 2) mengembangkan teknik analisis terhadap catatan lapangan baik berdasarkan rekaman tape atau bahan dokumentasi; 3) melakukan peer debriefing atau membicarakan data kepada orang lain, yaitu orang yang sebaya posisinya dengan peneliti. Orang tersebut tidak terlibat dalam penelitian ini namun memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok penelitian dan mengenai metode penelitian naturalistik, sehingga pandangan yang dikemukakannya bersifat netral dan obyektif, 4) triangulasi dengan sumber, yaitu dilakukan dengan membandingkan informasi dari sumber yang sama yang dihasilkan melalui wawancara dengan informasi yang dihasilkan melalui observasi, dengan pertimbangan bahwa informasi yang diperlukan adalah mengenai pelaksanaan bimbingan dari subjek yang sama.

Penelitian ini dilakukan di enam SD di wilayah Kota Bandung. Untuk mengetahui nilai transferabilitasnya, peneliti memberikan deskripsi yang terinci

sehingga hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

Untuk mencapai kriteria dependabilitas dan konfirmabilitas, peneliti menggunakan "*audit trail*" (Nasution, 1996:119) yang dilakukan oleh pembimbing. Untuk itu, peneliti menyediakan bahan-bahan yang meliputi: data mentah, seperti: catatan lapangan, hasil rekaman, dan dokumen; dan hasil analisis data berupa rangkuman, tafsiran, dan kesimpulan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induksi. Analisis induksi dilakukan setelah data terkumpul. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap setiap tema dari semua data yang masuk. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Nasution (1988:129) yaitu: 1) Reduksi data, 2) Display data, dan 3) Mengambil kesimpulan serta verifikasi data.

Reduksi data, pada tahap ini peneliti memilih data mana yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini informasi dari lapangan sebagai bahan mentah disingkat, diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

Display data, untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan, maka pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang

diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. Untuk memudahkan memperoleh kesimpulan dari setiap responden, maka dibuat matrik atau bagan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar bimbingan yang terdapat pada buku pedoman BP yang digunakan dan buku-buku tentang bimbingan atau referensi lain yang relevan seperti psikologi dan pendidikan. Dalam melakukan verifikasi, dilakukan peer debriefing dengan teman yang sebaya posisinya dengan peneliti. Sebagaimana disarankan oleh Nasution (1996:116) agar dalam membicarakan hasil penelitian dengan orang lain (peer debriefing) hendaknya dengan orang yang sebaya posisinya dengan peneliti, jadi jangan dengan orang senior karena ia akan terpengaruh oleh otoritasnya, jangan pula dengan orang junior, karena orang seperti ini enggan memberikan kritik. Untuk itu peneliti memilih seorang dosen dari jurusan PLB-FIP-UPI yang telah menyelesaikan studi S2 dengan program studi Bimbingan Anak Khusus di PPS UPI, dan seorang dosen PPB-FIP-UPI yang telah menyelesaikan studi S2 dengan program studi Bimbingan dan Penyuluhan PPS-UPI Bandung. Dengan ini diharapkan penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam buku pedoman BP yang digunakan di SD akan lebih tepat dan objektif

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hash keseluruhan temuan lapangan mengenai pelaksanaan layanan bimbingan yang dilakukan guru kepada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar. Temuan lapangan tersebut dideskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tabel. Pokok-pokok uraian yang dibahas dalam bab ini meliputi: a) temuan penelitian; dan b) pembahasan.

A. Temuan Penelitian

Dalam temuan penelitian ini diuraikan mengenai: 1) profil responden, 2) profil sekolah tempat bekerja responden, dan 3) pokok-pokok jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

Temuan penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian ditafsirkan berdasarkan arah kecenderungan yang mungkin terjadi. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan membandingkan data untuk mencari persamaan dan perbedaan data dari setiap permasalahan sebagai berikut.

1. Profil Responden

Profil responden secara keseluruhan disajikan pada tabel 2 di halaman lampiran. Sajian dalam tabel 2 tersebut merupakan hash temuan penelitian melalui angket kepada guru dan Kepala Sekolah. Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat ditafsirkan bahwa responden berjumlah 22 orang yang terdiri dari 17

perempuan dan 5 orang laki-laki. Usia responden laki-laki berkisar antara 32 tahun sampai dengan 58 tahun, sedangkan perempuan berkisar antara 25 sampai 54 tahun. Jenjang pendidikan responden berkisar dari jenjang SLTA sampai dengan Strata 1, yaitu: SPG satu orang, enam orang D2, Sarjana Muda satu orang, dan 14 orang Sarjana (Strata 1) dan seorang diantaranya adalah alumni jurusan BP. Seorang responden yang lainnya pernah menerima pendidikan tambahan tentang bimbingan dan pernah mempelajari buku pedoman BP SD. Dengan demikian, dari 22 responden, hanya dua responden yang pernah mempelajari buku Pedoman BP SD dan tidak untuk SLB.

Pada umumnya responden telah mendapat pendidikan tentang inklusi yang berupa penataran. Enam responden di antaranya belum mendapat pendidikan tambahan tentang inklusi, lima responden baru satu kali, lima responden yang lainnya dua kali, tiga responden tiga kali, satu orang empat kali, satu orang lima kali, dan satu orang telah tujuh kali mengikuti penataran dan pelatihan.

Pengalaman menjadi guru juga bervariasi, mulai dari 2 tahun sampai dengan 31 tahun. Sedangkan pengalaman dalam menangani ABK berkisar dari 1 tahun sampai dengan 6 tahun. 11 responden berstatus pegawai yayasan, dan 11 responden yang lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada umumnya mereka ditugaskan sebagai guru kelas dan seorang diantaranya menjadi guru bantu. Adapun kelas yang mereka ampu, dari 22 responden, terdapat 8 responden yang ditugaskan menjadi guru kelas 1,

tiga responden di kelas 2, empat responden di kelas 4, dua responden di kelas 5, dan tiga responden ditugaskan di kelas 6.

2. Profil Sekolah Tempat Bekerja Responden

Profil sekolah tempat di mana responden bekerja dapat dilihat secara keseluruhan pada tabel 3 di halaman lampiran. Berdasarkan data pada tabel 3 mengenai profil sekolah, dapat ditafsirkan bahwa dari enam Sekolah Dasar yang ditunjuk sebagai responden hanya dua SD yang berstatus Negeri, dan yang lainnya berstatus swasta (Yayasan/Disamakan). Yang paling tua di antara keenam SD didirikan tahun 1959 dan yang termuda didirikan tahun 1997. Baik yang termuda maupun yang tertua, keduanya berstatus swasta.

Masing-masing sekolah memiliki sarana dan prasarana yang cukup representatif. Namun kapasitas daya tampung siswa dan tiap-tiap SD berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas jumlah kelas yang ada. Dan keenam SD tersebut dari yang paling sedikit memiliki 6 ruang belajar, 10, 12, 14, 24 sampai dengan 26 ruang belajar. Dan semua SD masing-masing memiliki satu ruang Kepala Sekolah/ruang Guru, ruang Olah Raga, kamar mandi dan WC. Dua SD yang memiliki ruang khusus untuk TU. Empat SD yang memiliki ruang perpustakaan. Tiga SD yang memiliki ruang khusus untuk bimbingan, dua SD yang memiliki ruang komputer, tiga SD yang memiliki ruang UKS dan satu SD memiliki ruang klinik. Satu SD memiliki sebuah masjid, dua SD memiliki ruang musolla, dan satu SD memiliki gereja. Satu SD memiliki aula, dua SD memiliki ruang kesenian, dua SD memiliki ruang pramuka, dan tiga SD memiliki ruang kantin.

Di dalam masing-masing ruang belajar tersedia fasilitas penunjang belajar berupa satu meja guru, almari tempat menyimpan perlengkapan belajar siswa dan administrasi guru, serta alat-alat kebersihan ditambah dengan satu vas bunga. Pengaturan posisi tempat duduk siswa pada umumnya disajikan dalam bentuk posisi berbaris ke belakang. Ada satu SD diantaranya yang mengatur posisi tempat duduk dengan posisi setengah melingkar sehubungan dengan jumlah siswa yang relatif sedikit dan hal ini bergantung pada materi pelajaran yang diberikan. Masing-masing kelas dikelola oleh seorang guru dan untuk seluruh kelas disediakan guru Agama dan guru Olah Raga. Dua dari keenam SD menyediakan guru kesenian. Dari keenam SD, hanya dua SD yang tersedia guru bantu atau guru pendamping. Dari keenam SD tersebut tidak tersedia guru BP. Empat SD yang menyatakan bahwa BP dikoordinir langsung oleh Kepala Sekolah sedangkan dua yang lainnya menyatakan tidak ada koordinator BP.

3. Pokok-pokok Permasalahan yang diajukan

Pokok-pokok permasalahan yang dimaksud meliputi: a) penyusunan program bimbingan; b) tindakan guru dalam memahami diri siswa mengenai kebutuhan siswa, kekuatan dan kelemahannya, serta kesulitan yang dihadapi dalam mengikuti PBM; c) tindakan guru dalam memberikan bantuan kepada siswa yang menghadapi kesulitan dalam PBM; d) tindakan guru dalam mengevaluasi pelaksanaan bimbingan; e) tindakan guru dalam menganalisis hasil pelaksanaan bimbingan; f) tindakan guru dalam menindaklanjuti program

bimbingan yang telah dilaksanakan; dan g) faktor-faktor yang menghambat guru dalam melaksanakan bimbingan selama PBM di Sekolah Dasar.

a. Tindakan Guru dalam Menyusun Perencanaan Program Bimbingan bagi ABK di Sekolah Dasar.

Pokok-pokok jawaban responden mengenai tindakannya dalam menyusun perencanaan program bimbingan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar dicantumkan pada tabel 4 dalam halaman lampiran.

Berdasarkan data pada tabel 4 tentang tindakan guru dalam menyusun perencanaan program bimbingan bagi ABK di SD dapat ditafsirkan dari keenam Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 22 responden mengungkapkan bahwa mereka tidak membuat satuan layanan bimbingan secara khusus dalam memberikan layanan bimbingan kepada ABK. Program yang mereka buat adalah satuan pelajaran (satpel) bagi ABK yang terpadu dengan satpel bagi anak biasa. Mereka menamakannya sebagai program harian. Demikian pula mereka membuat program catur wulan/semester. Dari enam SD, hanya satu SD (4 responden) yang membuat program mingguan dan program bulanan, sedangkan program tahunan dilakukan oleh tiga SD (5 responden). Tiga SD (6 responden) membuat satuan pengajaran perbaikan, empat SD (6 responden) membuat satuan pengajaran pengayaan, tiga SD (5 responden) membuat satuan kegiatan kunjungan rumah, tiga SD (9 responden) membuat laporan kehadiran, tiga SD (6 responden) membuat catatan kejadian penting, dua SD (4 responden) kartu komunikasi, satu

SD (1 responden) membuat kartu pribadi, dan satu SD (6 responden) membuat satuan analisis hasil evaluasi.

Dari enam SD, hanya satu SD (2 responden) yang membuat perencanaan berdasarkan hasil deteksi, satu SD (1 responden) berdasarkan hasil penjarangan sendiri, satu SD (3 responden) berdasarkan hasil penjarangan Diknas Kota Bandung, empat SD (8 responden) berdasarkan asesmen, tiga SD (6 responden) berdasarkan musyawarah antar guru dan Kep.Sek., lima SD (13 responden) berdasarkan informasi dari Psikolog dan Dokter, dan lima SD (16 responden) berdasarkan informasi dari keluarga siswa.

Keenam SD dan dari semua responden perencanaan dibuat sendiri oleh guru kelas dan dikoordinasikan kepada Kepala Sekolah. Namun kadang-kadang dibuat bersama-sama dengan guru bidang pengajaran (tiga SD/8 responden), bersama-sama dengan guru PLB atau guru pendamping (dua SD/9 responden), guru BP (satu SD/3 responden), dan keseluruhannya dikoordinasikan kepada Kepala Sekolah.

Sebelum membuat satuan pelajaran, responden mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Empat SD (15 responden) mengumpulkan informasi berupa kondisi siswa, lima SD (20 responden) mengumpulkan informasi berupa kondisi siswa dan latar belakang keluarga siswa, dan satu SD (2 responden) mengumpulkan informasi berupa kondisi siswa, latar belakang keluarga siswa, dan kondisi sekolah.

Secara operasional, layanan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pada pedoman BP SD. Ini dilakukan oleh lima SD yang terdiri dari 16 responden. Satu SD (4 responden) dilaksanakan berdasarkan perpaduan antara pedoman BP SD dan SLB, satu SD (4 responden) berdasarkan referensi psikolog dan dokterinformasi dari para ahli, dan satu SD (4 responden) berdasarkan hasil analisis evaluasi. Dari keenam SD, ada tiga SD (8 responden) melaksanakan bimbingan tanpa menggunakan pedoman BP dan satu SD (3 responden) belum pernah melihat buku pedoman BP.

b. Tindakan Guru dalam Memahami Diri ABK dalam Mengikuti PBM di Sekolah Dasar

Inti jawaban tentang tindakan guru dalam memahami diri siswa mengenai kebutuhan siswa, kekuatan dan kelemahannya, serta kesulitan yang dihadapi dalam mengikuti PBM di Sekolah Dasar dapat dilihat dalam tabel 5 di halaman lampiran.

Berdasarkan data pada tabel 5 dapat ditafsirkan bahwa untuk memahami siswa ABK, lima SD (9 responden) melakukan identifikasi jenis informasi yang diperlukan, dan 13 responden dari enam SD tidak mengidentifikasi jenis informasi yang diperlukan.

Beberapa SD mempersiapkan alat pengumpul data yang akan digunakan, berupa pedoman observasi dilakukan oleh tiga SD (8 responden), dua SD (3 responden) mempersiapkan pedoman observasi dan angket, tiga SD

(8 responden) mempersiapkan pedoman observasi dan daftar nilai prestasi belajar, satu SD (4 responden) mempersiapkan daftar nilai prestasi belajar, satu SD (2 responden) mempersiapkan pedoman observasi, daftar nilai prestasi belajar, dan kartu konsultasi, lima SD (15 responden) mempersiapkan catatan harian. Satu SD (2 responden) tidak mempersiapkan alat pengumpul data dengan pertimbangan bahwa pengumpulan informasi dilakukan secara langsung berhubungan dengan orang tua dan jika ada keperluan mendadak digunakan buku penghubung.

Sebelum membuat satuan pelajaran, responden mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Empat SD (15 responden) mengumpulkan informasi berupa kondisi siswa, lima SD (20 responden) mengumpulkan informasi berupa kondisi siswa dan latar belakang keluarga siswa, dan satu SD (2 responden) mengumpulkan informasi berupa kondisi siswa, latar belakang keluarga siswa, dan kondisi sekolah.

Pengumpulan informasi tentang kondisi siswa, tiga SD (8 responden) mengumpulkan informasi mengenai kemampuan akademik siswa, kemampuan sosial di lingkungan keluarga dan kemampuan sosial di lingkungan sekolah, kondisi fisik, kondisi emosi, sikap dan kepribadian, kesulitan dan kebiasaan belajar siswa. lima SD (14 responden) mengumpulkan informasi mengenai kemampuan akademik siswa, satu SD (4 responden) mengumpulkan hasil tes inteligensi, dua SD (6 responden) mengumpulkan informasi mengenai kemampuan akademik siswa, kemampuan sosial di lingkungan keluarga dan

kemampuan sosial di lingkungan sekolah, satu SD (1 responden) mengumpulkan informasi mengenai kemampuan akademik siswa dan kemampuan sosial di lingkungan sekolah, dan satu SD (1 responden) mengumpulkan informasi tentang kemampuan berbicara.

Informasi mengenai latar belakang keluarga siswa, meliputi: pendidikan ortu, pekerjaan, status ekonomi sosial keluarga, sikap, pelayanan dan harapan keluarga the ABK dikumpulkan oleh empat SD (8 responden), dua SD (5) menambahkannya dengan jumlah keluarga. Satu SD (4 responden) menambahkannya dengan kedudukan siswa dalam keluarga, satu SD menambahkannya dengan perhatian orang tua kepada ABK.

Informasi tentang kondisi sekolah, meliputi: sikap guru, sikap siswa, sikap Kepala Sekolah terhadap ABK, dikumpulkan oleh empat SD (15 responden). Satu SD (2 responden) menambahkan informasi tentang kurikulum, tiga SD (9 responden) menambahkan informasi tentang sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia.

Informasi mengenai kondisi siswa, empat SD (15 responden) mengumpulkannya melalui referensi psikolog, dokter, laporan kemajuan siswa, observasi perilaku siswa di sekolah. Satu SD (seorang responden) melalui referensi psikolog, dokter, speech therapist. Dua SD (5 responden) melakukan observasi perilaku siswa di sekolah dan di rumah. Tiga SD (8 responden) melakukan wawancara dengan siswa dan orang tua di sekolah. Tiga SD

melakukan diskusi dengan personel sekolah, di antaranya satu SD (4 responden) menggunakan referensi dari guru PLB.

Untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kesulitan, dan kebutuhan siswa dilakukan melalui analisis hasil tes dan analisis hasil observasi. Hal ini dilakukan oleh empat SD (16 responden). Satu SD (2 responden) menambahkan hasil diskusi dengan personal sekolah. Tiga SD menambahkan analisis hasil wawancara dengan siswa maupun dengan orang tua siswa. Satu SD (seorang responden) menganalisis bagan yang dibuat sendiri.

c. Tindakan Guru dalam Memberikan Bantuan kepada ABK yang Menghadapi Kesulitan dalam PBM di Sekolah Dasar

Jawaban terhadap fokus penelitian tentang Tindakan guru dalam memberikan bantuan kepada siswa yang menghadapi kesulitan dalam PBM di Sekolah Dasar dicantumkan pada tabel 6 di halaman lampiran.

Berdasarkan data pada tabel 6 tentang tindakan guru dalam memberikan bantuan kepada ABK yang menghadapi kesulitan belajar di SD dapat ditafsirkan bahwa pemberian bantuan bergantung pada tingkat kesukaran yang dihadapinya. Hal ini dikemukakan oleh semua responden dari keenam SD. Andaikata kesulitan di anggap berat, maka sebelum memberikan bantuan responden melakukan penandaan atau pengalokisasian kesulitan, mencari faktor penyebabnya dan mencari alternatif pemecahannya. Hal ini dilakukan oleh enam SD (17 responden).

Untuk pengalokasian letak kesulitan siswa lima SD (18 responden) dengan menghitung nilai rata-rata kelas/kelompok, membandingkan nilai prestasi ABK dengan nilai rata-rata kelas, dan menganalisis hasil pengamatan selama PBM. Satu SD (seorang responden) menambahkan bahwa selain hal tersebut, juga membandingkan nilai prestasi ABK dengan prestasinya di masa lalu. Satu SD (seorang responden) membandingkan kehadiran dan partisipasi siswa ABK dengan yang lainnya dalam mengikuti PBM. Dua SD (2 responden) mendeteksi kesulitan siswa dalam bidang pelajaran tertentu. Satu SD (3 responden) membandingkan durasi dan frekuensi antar siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas selama PBM.

Untuk mencari faktor penyebab, clan lima SD (11 responden) dilakukan melalui kerjasama dengan teman sejawat, kepala sekolah. Dua SD (6 responden) kadang-kadang dengan dokter dan psikolog. Kemudian dibuat kesimpulan sementara dan perkiraan tentang mungkin tidaknya kesulitan tersebut untuk diatasi kemudian dibuat rekomendasi bagi pelaksanaan pemecahannya. Tiga SD (11 responden) mengungkapkan bahwa untuk mencari penyebab kesulitan dilakukan dengan menganalisis jawaban tes yang diberikan. Kemudian dibuat kesimpulan sementara dan perkiraan tentang mungkin tidaknya kesulitan tersebut untuk diatasi kemudian dibuat rekomendasi bagi pelaksanaan pemecahannya.

Keenam SD (20 responden) mengungkapkan bahwa materi yang diberikan bergantung pada penyebab kesulitan, dua responden yang lainnya dari satu SD mengungkapkan bahwa pemberian materi bergantung pada sumber

kelemahannya. Materi yang diberikan berupa pengenalan dan pengembangan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar, serta pengembangan keterampilan belajar membaca, menulis, dan berhitung terutama bagi anak-anak kelas I dan II. Pengajaran perbaikan dilakukan oleh empat SD (12 responder).

Semua responden dari keenam SD memberikan bantuan secara individual oleh guru kelas atau oleh guru bidang pengajaran dengan mengambil waktu di luar jam pelajaran akan tetapi pada hari-hari sekolah di kelas masing-masing atau di perpustakaan. Kadang-kadang secara kelompok atau klasikal bergantung pada permasalahan yang dihadapi. Tiga SD (14 responden) memberikan bantuan kepada ABK secara individual yang dilakukan oleh guru PLB atau guru pendamping diluar jam sekolah. Sedangkan tempat pelaksanaannya di tempat lain yang disepakati bersama dengan siswa.

Bagi kesulitan tahap ringan, bantuan diberikan secara spontan dan terpadu dengan KBM biasa. Tindakan ini dilakukan oleh semua responden dari keenam SD.

d. Tindakan Guru dalam Mengadakan Evaluasi, Analisis Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar

Isi jawaban mengenai tindakan guru dalam mengevaluasi pelaksanaan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar tercantum pada tabel 7 di halaman lampiran.

Berdasarkan data pada tabel 7 tentang tindakan guru dalam mengevaluasi, menganalisis hasil evaluasi dan bagaimana guru menindaklanjuti hasil evaluasi dalam melaksanakan bimbingan kepada ABK di SD dapat ditafsirkan bahwa:

Dalam mengevaluasi pelaksanaan bantuan yang diberikan, lima SD (13 responden) terlebih dahulu menetapkan aspek-aspek yang dinilai ataupun kriteria penilaian keberhasilan bantuan yang ditulis dalam satuan pelajaran. Sembilan responden yang lainnya hanya menetapkan aspek-aspek yang dinilai dan ditulis dalam satuan pelajaran.

Semua responden dari keenam SD menggunakan instrumen penilaian berupa alat tes/soal-soal yang dibuat sendiri dan menyatu dalam satuan pelajaran /program harian. Penilaian dilakukan oleh guru kelas dan atau guru bidang pelajaran. Dua SD (10 responden) penilaian dilakukan oleh guru PLB atau guru pendamping.

15 responden dari lima SD menganalisis hasil evaluasi dengan menilai dan menafsirkan jawaban jawaban siswa, kemudian dibuat suatu catatan untuk menetapkan kemungkinan-kemungkinan dari hasil penafsiran yang dilakukan. Satu SD (seorang responden) membuat rekomendasi sesuai dengan hasil penetapan (mis: harus melakukan re diagnostik dsb). Satu SD (3 responden) tidak melakukan analisis, mereka menilai jawaban jawaban siswa, kemudian dibuat suatu catatan untuk dilaporkan kepada orang tua siswa atau kepada yang berkepentingan. Satu SD (seorang responden) menganalisis hasil evaluasi dengan

menilai dan menafsirkan jawaban jawaban siswa, kemudian dibuat suatu catatan untuk mengadakan re-evaluasi.

e. Faktor-faktor yang menghambat guru dalam melaksanakan bimbingan selama PBM di Sekolah Dasar

Jawaban terhadap fokus penelitian tentang faktor-faktor yang menghambat guru dalam melaksanakan bimbingan selama PBM di Sekolah Dasar tercantum pada tabel 8 di halaman lampiran.

Berdasarkan data pada tabel 8 tentang hambatan yang dialami guru dalam melaksanakan bimbingan bagi ABK di SD dapat ditafsirkan bahwa semua responden dari keenam SD mengungkapkan terdapat hambatan dalam melaksanakan bimbingan bagi ABK di SD. Hambatan tersebut meliputi: faktor tenaga bimbingan diungkapkan oleh 18 responden dari lima SD, program bimbingan diungkapkan oleh 11 responden dari lima SD, 10 responden dari lima SD mengalami hambatan dari faktor siswa, tujuh responden dari empat SD mengalami hambatan yang datang dari orang tua siswa, delapan responden dari tiga SD mengalami hambatan dari faktor personil sekolah, dan semua responden dari keenam SD mengalami hambatan dari faktor sarana dan prasarana.

Hambatan yang bersumber dari tenaga pembimbing, meliputi: kurangnya keterampilan guru kelas maupun guru bidang pengajaran tentang BP. Hal ini dikemukakan oleh 17 responden dari empat SD. Empat responden dari dua SD mengemukakan tidak ada guru PLB dan tidak ada guru BP. Tiga responden dari

satu SD mengungkapkan tidak ada koordinator BP. Seorang responden mengungkapkan bahwa kegiatan guru terlalu padat.

Hambatan yang bersumber dari faktor program bimbingan, empat SD (13 responden) mengemukakan bahwa: kesulitan dalam mengatur waktu karena adanya tugas-tugas administrasi lain, dua SD (5 responden) program bimbingan menyatu dengan program pembelajaran. Satu SD (2 responden) kesulitan dalam mengumpulkan informasi tentang kondisi siswa. Dua SD (3 responden) mengungkapkan bahwa tidak ada contoh pedoman program bimbingan. Satu SD (2 responden) mengungkapkan bahwa program pembelajaran lebih penting dari pada program bimbingan. Satu SD (seorang responden) menjelaskan bahwa tidak ada instruksi yang tegas dari yang berwenang dan yang berkewajiban membuat program bimbingan adalah guru PLB.

Hambatan yang bersumber dari faktor personal sekolah, meliputi: kurang adanya komunikasi antara guru kelas dengan guru PLB, guru bidang pengajaran, maupun koordinator BP. Hal ini dikemukakan oleh dua SD (4 responden). Satu SD (3 responden) mengungkapkan bahwa jarang diadakan pertemuan/rapat sekolah mengenai bimbingan. Dua SD (10 responden) mengatakan tidak ada koordinator BP dan satu SD (4 responden) mengatakan tidak ada guru PLB

Hambatan yang bersumber dari faktor siswa, yaitu: adanya ABK yang kurang mampu beradaptasi dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikemukakan oleh empat SD (12 responden). Satu SD (3 responden) mengungkapkan adanya perlindungan yang berlebihan clan teman-temannya yang biasa. Seorang

responden mengatakan adanya ABK yang selalu ingin dibantu akibat over protection dari keluarga., dan satu SD (4 responden) menjelaskan kondisi anak yang sangat berbeda-beda.

Hambatan yang bersumber dari faktor orang tua siswa, Dua SD (8 responden) mengemukakan tentang adanya kekhawatiran orang tua ABK yang berlebihan terhadap anaknya. Satu SD (3 responden) menyatakan adanya kekhawatiran orang tua anak biasa tentang kehadiran ABK dan mereka komplek. Dua SD (4 responden) adanya ketidakpahaman orang tua ABK terhadap kondisi anaknya atau bagaimana ia harus memperlakukan anaknya yang ABK. Demikian juga ada orang tua yang tidak mau tahu tentang anaknya. Satu SD (2 responden) adanya harapan orang tua ABK yang berlebihan.

Hambatan yang bersumber dari faktor sarana dan prasarana, satu SD (4 responden) mengungkapkan kurang memadainya ruang khusus bimbingan. Tiga SD (13 responden) menyatakan tidak ada ruang khusus bimbingan. Dua SD (5 responden) mengungkapkan tidak ada media/alat bimbingan/pembelajaran untuk ABK, dan satu SD (3 responden) mengatakan kesulitan dalam mengoperasikan alat peraga, karena sangat individual, serta tidak ada buku pedoman BP baik SD maupun SLB. Hal ini dikemukakan oleh dua SD (4 responden).

f. Prestasi Belajar ABK di SD

Prestasi belajar ABK di sekolah tercantum pada tabel 9 di halaman lampiran.

Berdasarkan data pada tabel 9 tentang prestasi belajar ABK di SD dapat ditafsirkan bahwa dari 10 mata pelajaran yang diikuti oleh ABK yang berjumlah 33 siswa yang bersekolah di enam SD memperoleh prestasi dari prestasi kurang sekali sampai baik sekali. Prestasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan Agama,

Baik Sekali	: 2 responden
Baik	: 2 responden
Cukup	: 24 responden
Kurang	: 4 responden
Kurang Sekali	: seorang responden.

2. PPKN;

Baik Sekali	
Baik	: 4 responden
Cukup	: 24 responden
Kurang	: 4 responden
Kurang Sekali	: seorang responden.

3. Bahasa Indonesia;

Baik Sekali	: seorang responden
Baik	: 4 responden
Cukup	: 15 responden
Kurang	: 8 responden
Kurang Sekali	: 5 responden.

4. Matematika

Baik Sekali	: seorang responden
Baik	: 6 responden
Cukup	: 16 responden

Kurang Kurang Sekali	9 responden seorang responden.
5. IPA	
Baik Sekali	seorang responden
Balk	5 responden
Cukup	8 responden
Kurang	11 responden
Kurang Sekali	
Belum mengikuti	8 responden
6. IPS	
Baik Sekali	seorang responden
Balk	seorang responden
Cukup	15 responden
Kurang	11 responden
Kurang Sekali	
Belum mengikuti	5 responden
7. Bahasa Daerah	
Balk Sekall	seorang responden
Balk	2 responden
Cukup	21 responden
Kurang	6 responden
Kurang Sekali	3 responden.
8. Bahasa Inggris	
Balk Sekall	seorang responden
Baik	
Cukup	8 responden
Kurang	12 responden
Kurang Sekali	5 responden.
Belum mengikuti	7 responden
9. Olah raga dan Kesenian	
Balk Sekall	
Baik	

Cukup	: 16 responden
Kurang	: 12 responden
Kurang Sekali	: 5 responden.

10. Keterampilan

Baik Sekali	: seorang responden
Baik	: 2 responden
Cukup	: 18 responden
Kurang	: 10 responden
Kurang Sekali	: 2 responden.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang layanan bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar wilayah kota Bandung dari enam SD (22 responden), dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Tindakan Responden dalam Pembuatan Perencanaan Program Bimbingan bagi ABK di SD

Semua responden tidak membuat satuan layanan bimbingan secara khusus dalam memberikan layanan bimbingan kepada ABK dengan berbagai pertimbangan. *Pertama*, belum tersedianya buku pedoman BP khusus untuk ABK di SD. *Kedua*, belum tersedianya contoh satuan layanan bimbingan dalam buku pedoman BP baik untuk SD maupun untuk SLB. *Ketiga*, sehubungan dengan status kepegawaiannya; Sehubungan dengan tidak adanya kenaikan golongan bagi guru yayasan (50% dari seluruh responden berstatus pegawai yayasan), sehingga responden kurang tertantang untuk menyusun dan mengembangkan program bimbingan di sekolah. Sedangkan bagi guru yang berstatus PNS, tidak memperoleh instruksi yang tegas dari yang berwenang. *Keempat*, terdapat suatu kecenderungan bahwa persepsi guru tentang satuan layanan bimbingan adalah identik dengan satuan pembelajaran yang mereka namakan sebagai program harian.

Walaupun demikian, semua responden mengakui pentingnya pembuatan perencanaan program bimbingan bagi ABK di SD yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan layanan bimbingan, sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan bimbingan. Pentingnya program perencanaan bimbingan didukung oleh pendapat para ahli bahwa program bimbingan yang direncanakan secara baik dan terinci, banyak keuntungan bagi murid yang mendapat bimbingan maupun bagi petugas yang menyelenggarakannya.

Adapun program yang dibuat responden adalah satuan pelajaran (satpel) bagi ABK yang terpadu dengan satpel bagi anak biasa; program mingguan dan program bulanan, program pelajaran catur wulan/semester, program tahunan; satuan pengajaran perbaikan; satuan pengajaran pengayaan, satuan kegiatan kunjungan rumah; membuat laporan kehadiran, catatan kejadian penting; kartu komunikasi, kartu pribadi, dan satuan analisis hasil evaluasi pengajaran.

Program perencanaan pengajaran dibuat berdasarkan hasil deteksi, hasil penjarangan sendiri, hasil penjarangan Diknas Kota Bandung, hasil asesmen buatan sendiri, hasil musyawarah antar guru dan Kep.Sek., informasi dari Psikolog dan Dokter, dan dari keluarga siswa. Semua responden membuat perencanaan sendiri oleh guru kelas dan dikoordinasikan kepada Kepala Sekolah. Kadang-kadang dibuat bersama-sama dengan guru bidang pengajaran, guru PLB atau guru pendamping, guru BP, dan keseluruhannya dikoordinasikan kepada Kepala Sekolah. Sebelum membuat satuan pelajaran, responden mengumpulkan

informasi terlebih dahulu berupa kondisi siswa, latar belakang keluarga siswa, dan kondisi sekolah.

2. Tindakan Responden dalam Memahami Diri ABK dalam Mengikuti PBM di Sekolah Dasar

Dalam memahami diri ABK sebagian besar responden melakukan identifikasi jenis informasi yang diperlukan dan mengumpulkan informasi berupa kondisi siswa, latar belakang keluarga siswa, dan kondisi sekolah. Hal ini dilakukan sebelum responden membuat satuan pelajaran dan untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kesulitan, dan kebutuhan siswa.

Beberapa responden mempersiapkan alat pengumpul data yang akan digunakan, berupa pedoman observasi, angket, daftar nilai prestasi belajar, kartu konsultasi, dan catatan harian. Sebagian kecil dari responden tidak mempersiapkan alat pengumpul data dengan pertimbangan bahwa pengumpulan informasi dilakukan secara langsung berhubungan dengan orang tua dan jika ada keperluan mendadak digunakan buku penghubung.

Informasi tentang kondisi siswa, meliputi: kemampuan akademik, kemampuan sosial, kondisi fisik, kondisi emosi, sikap dan kepribadian, kesulitan dan kebiasaan belajar siswa. Sebagian kecil, responden mengumpulkan hasil tes inteligensi dan kemampuan berbicara.

Informasi mengenai latar belakang keluarga siswa, meliputi: pendidikan ortu, pekerjaan, status ekonomi sosial keluarga, sikap, pelayanan dan harapan

keluarga terhadap ABK, jumlah keluarga, kedudukan siswa dalam keluarga, dan perhatian orang tua kepada ABK.

Informasi tentang kondisi sekolah, meliputi: sikap guru, sikap siswa, sikap Kepala Sekolah terhadap ABK, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia.

Sumber informasi dikumpulkan melalui referensi psikolog, dokter, speech therapist, laporan kemajuan siswa, hasil observasi perilaku siswa di sekolah dan di rumah, hasil wawancara dengan siswa dan orang tua di sekolah, diskusi dengan personil sekolah, di antaranya menggunakan referensi dari guru PLB.

3. Tindakan Responden dalam Memberikan Bantuan kepada ABK yang Mengalami Kesulitan dalam PBM

Mengenai pemberian bantuan kepada ABK yang menghadapi kesulitan belajar di SD bergantung pada tingkat kesukaran yang dihadapinya. Andaikata kesulitan di anggap berat, maka sebelum memberikan bantuan responden melakukan penandaan atau pengalokalsiasian kesulitan, mencari faktor penyebabnya dan mencari alternatif pemecahannya. Dan bagi kesulitan tahap ringan, bantuan diberikan secara spontan dan terpadu dengan KBM biasa.

Untuk pengalokasian letak kesulitan ABK sebagian besar dari responden melakukannya dengan menghitung nilai rata-rata kelas/kelompok, membandingkan nilai prestasi ABK dengan nilai rata-rata kelas, dan menganalisis hasil pengamatan selama PBM. Juga membandingkan nilai prestasi ABK dengan

prestasinya di masa lalu. Membandingkan kehadiran dan partisipasi siswa ABK dengan yang lainnya dalam mengikuti PBM. Mendeteksi kesulitan siswa dalam bidang pelajaran tertentu. Membandingkan durasi dan frekuensi antar siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas selama PBM.

Dalam mencari faktor penyebab kesulitan belajar siswa, responden melakukannya melalui kerjasama dengan teman sejawat, kepala sekolah, kadang-kadang dengan dokter dan psikolog, menganalisis jawaban tes yang diberikan. Kemudian dibuat kesimpulan sementara dan perkiraan tentang mungkin tidaknya kesulitan tersebut untuk diatasi kemudian dibuat rekomendasi bagi pelaksanaan pemecahannya.

Demikian pula dengan materi yang diberikan bergantung pada faktor penyebab kesulitan atau bergantung pada sumber kelemahannya. Materi yang diberikan dapat berupa pengenalan dan pengembangan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar, serta pengembangan keterampilan belajar membaca, menulis, dan berhitung terutama bagi anak-anak kelas I dan II.

4. Tindakan Responden dalam Menilai Keberhasilan ABK selama Mengikuti Proses Pembimbingan

Dalam mengevaluasi pelaksanaan bantuan yang diberikan, responden terlebih dahulu menetapkan aspek-aspek yang dinilai ataupun kriteria penilaian keberhasilan bantuan yang ditulis dalam satuan pelajaran. Instrumen penilaian yang digunakan berupa alat tes/soal-soal yang dibuat sendiri dan menyatu dalam

satuan pelajaran /program harian. Penilaian dilakukan oleh guru kelas dan atau guru bidang pelajaran, dan oleh guru PLB atau guru pendamping.

Dengan informasi tersebut dapat diketahui sampai sejauhmana keberhasilan kegiatan layanan bimbingan yang akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pelayanan bimbingan kepada siswa. Dengan demikian dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya.

5. Tindakan Responden dalam Menganalisis Hasil Penilaian Keberhasilan Belajar ABK selama Mengikuti Proses Pembimbingan

Mengenai analisis hasil evaluasi responden menilai dan menafsirkan jawaban jawaban siswa, kemudian dibuat suatu catatan untuk menetapkan kemungkinan-kemungkinan dari hasil penafsiran yang dilakukan, membuat rekomendasi sesuai dengan hasil penetapan (mis: harus melakukan re diagmostik dsb), atau menilai dan menafsirkan jawaban jawaban siswa, kemudian dibuat suatu catatan untuk dilaporkan kepada orang tua siswa atau kepada yang berkepentingan atau untuk mengadakan re-evaluasi.

6. Tindakan Responden dalam Melakukan Tindak Lanjut terhadap Penilaian Keberhasilan Belajar ABK selama Mengikuti Proses Pembimbingan

Dalam menindak lanjuti penilaian keberhasilan belajar siswa selama mengikuti proses pembimbingan sebagian responden menentukan program pembelajaran selanjutnya, bagi siswa yang mengalami kesulitan disusun program pengajaran remedial; bagi siswa yang cukup cepat dalam mengikuti pelajaran

dirancang program-program pengayaan sesuai dengan minat dan kemampuan siswa.

7. Faktor-faktor yang Menghambat dan Upaya Responden dalam Melaksanakan Layanan Bimbingan bagi ABK di SD

Terdapat enam faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan bimbingan bagi ABK di SD. Hambatan tersebut meliputi: faktor tenaga bimbingan, program bimbingan, faktor siswa, orang tua siswa, faktor personal sekolah, sarana dan prasarana.

Hambatan yang bersumber dari tenaga pembimbing, meliputi: kurangnya keterampilan guru kelas maupun guru bidang pengajaran tentang BP, tidak ada guru PLB dan tidak ada guru BP, tidak ada koordinator BP, dan terlalu padatnya kegiatan guru.

Hambatan yang bersumber dari faktor program bimbingan, meliputi: kesulitan dalam mengatur waktu karena adanya tugas-tugas administrasi lain, program bimbingan menyatu dengan program pembelajaran, kesulitan dalam mengumpulkan informasi tentang kondisi siswa, tidak ada contoh pedoman program bimbingan, program pembelajaran lebih penting dari pada program bimbingan, tidak ada instruksi yang tegas dari yang berwenang dan yang berkewajiban membuat program bimbingan adalah guru PLB.

Hambatan yang bersumber dari faktor personal sekolah, sarana dan prasarana meliputi: kurang adanya komunikasi antara guru kelas, dengan guru PLB, guru bidang pengajaran, maupun koordinator BP, jarang diadakan

pertemuan/rapat sekolah mengenai bimbingan, tidak ada koordinator BP, dan tidak ada guru PLB.

Hambatan yang bersumber dari faktor sarana dan prasarana, meliputi: kurang memadainya atau tidak ada ruang khusus bimbingan, tidak ada media/alat bimbingan/pembelajaran untuk ABK, dan kesulitan dalam mengoperasikan alat peraga, karena sangat individual, serta tidak ada buku pedoman BP baik SD maupun SLB.

Hambatan yang bersumber dari faktor siswa, yaitu: adanya ABK yang kurang mampu beradaptasi dengan siswa yang lainnya, adanya perlindungan yang berlebihan dari teman-temannya yang biasa, adanya ABK yang selalu ingin dibantu akibat over protection dari keluarga, dan kesulitan penanganan akibat dari kondisi anak yang sangat berbeda-beda. Sedangkan hambatan yang bersumber dari faktor orang tua siswa, di antaranya adalah: adanya kekhawatiran orang tua ABK yang berlebihan terhadap anaknya, adanya kekhawatiran orang tua anak biasa tentang kehadiran ABK, adanya ketidakpahaman orang tua ABK terhadap kondisi anaknya atau bagaimana ia harus memperlakukan anaknya yang ABK, ada orang tua yang tidak mau tahu tentang anaknya, serta harapan orang tua ABK yang berlebihan.

Dengan tindakan-tindakan guru yang demikian, maka proses layanan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus di SD belum optimal, sehingga pencapaian tujuan pendidikan bagi mereka menjadi terhambat.

B. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan layanan bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar, maka dikemukakan rekomendasi kepada: 1) Guru-guru Sekolah Dasar, 2) Kepala Sekolah Dasar, dan 3) kepada Lembaga yang berwenang.

1. Guru-guru Sekolah Dasar

Penelitian ini membuktikan tentang perlunya peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan pelayanan bimbingan kepada Anak Berkebutuhan Khusus secara profesional.

Guru sebagai pendidik dan pembimbing, seyogyanya mengembangkan kemampuan profesionalnya terutama wawasan tentang karakteristik dan meningkatkan keterampilan dalam mengasesmen ABK, pembuatan perencanaan program bimbingan, serta melakukan konsultasi dan koordinasi baik dengan tenaga ahli maupun dengan para orang tua, sehingga dapat memberikan layanan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak.

2. Kepala Sekolah Dasar

Penelitian ini membuktikan bahwa guru-guru sangat mengharapkan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang layanan bimbingan di sekolah. Harapan tersebut akan terealisasikan apabila ada kerjasama antara Kepala Sekolah dengan pihak terkait, seperti: LPTK, PGK, atau BPG untuk

membuat perencanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan bidang bimbingan bagi guru-guru SD terutama yang menangani ABK.

Di samping itu, penelitian ini membuktikan adanya hambatan yang bersumber dari faktor personal sekolah, sarana dan prasarana. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara keseluruhan dan sebagai koordinator BP di sekolah seyogyanya melakukan pembinaan dan pengembangan personil baik secara akademik, fisik, maupun secara psikologis untuk menjalin komunikasi yang baik di antara personil sekolah, sehingga tercipta suatu iklim yang lebih kondusif yang dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

3. Lembaga yang Berwenang

Keterbatasan pengetahuan guru tentang bimbingan khususnya bagi ABK di SD, antara lain disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang diterima di LPTK sebelumnya. Untuk itu LPTK khususnya kepada jurusan PPB dan jurusan PLB seyogyanya mengoptimalkan materi bimbingan dan penyuluhan khususnya bagi ABK.

Salah satu kendala yang menghambat pelaksanaan bimbingan bagi ABK di SD adalah belum tersedianya satuan layanan bimbingan yang dirancang secara khusus dalam buku pedoman BP baik di SD maupun SLB. Untuk itu, kepada para penyusun kurikulum agar memasukkan format satuan layanan bimbingan ke dalam pedoman bimbingan dan penyuluhan bagi ABK di SD. Sebagai landasan empiris bagi penyusun kurikulum dapat dipertimbangkan satuan layanan

bimbingan yang diindividualisasikan dan terpadu dengan program pembelajaran bagi siswa ABK dari setiap bidang studi berikut ini.

Sehubungan dengan karakteristik-karakteristik yang ada pada masing-masing ABK yang memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus, maka sudah selayaknyalah program bimbingan dan pembelajaran bagi mereka hendaknya disesuaikan pula dengan kondisi dan kebutuhan mereka agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal.

Program layanan bimbingan yang diindividualisasikan merupakan program layanan bimbingan yang merujuk pada kebutuhan dan minat siswa. Karena itu pada bagian MI akan mencoba menerapkan program tersebut pada bidang studi membaca.

Menurut Kitano dan Kirby (Abdurrahman,1995) terdapat lima langkah utama dalam penyusunan program individualisasi, yaitu: 1) membentuk tim penilai program, 2) menilai kekuatan dan kelemahan siswa, 3) mengembangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, 4) merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan, dan 5) menentukan alat evaluasi.

Berikut contoh penyusunan program individualisasi layanan bimbingan bidang pengajaran membaca bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar.

Bersama-sama dengan tim penilai program yang telah dibentuk, guru melakukan asesmen untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesulitan, dan kebutuhan siswa. Bagi siswa yang belum pernah belajar membaca maka berikan tes program kesiapan. Sedangkan bagi yang sudah atau sedang belajar

membaca, di samping memberikan tes program kesiapan, juga buatlah item-item tes untuk mengetahui batas-batas materi pengetahuan, tingkat dan jenis kemampuan yang telah dicapai dan dikuasai siswa berdasarkan kurikulum atau garis-garis besar pedoman pengajaran(GBPP) yang berlaku. Hasil tes yang diperoleh dapat dijadikan sebagai landasan dalam rangka melakukan proses pembelajaran selanjutnya.

Bagi siswa yang memiliki semua keterampilan yang disyaratkan dapat diberikan pelajaran membaca secara formal. Sementara bagi mereka yang belum memiliki keterampilan yang dipersyaratkan, tentunya mereka masih memerlukan latihan-latihan yang disebut dengan readiness program (program kesiapan). Program tersebut hendaknya benar-benar ditanamkan kepada siswa, karena merupakan landasan bagi pelajaran membaca selanjutnya.

Terdapat empat langkah dalam pengembangan tes buatan guru yaitu:

- 1) Secara hirarki memilih seluruh bahan yang akan diujikan berdasarkan kurikulum atau GBPP membaca yang ada, 2) tentukan keterampilan atau materi apa yang dibutuhkan; 3) buatlah item-item untuk setiap keterampilan atau materi yang dipilih; dan 4) buatlah skor tes dan interpretasi tentang penampilan siswa.

Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut.

Pokok/Subpokok bahasan	Penjabaran Materi	Item-item Tes	Skor	Interpretasi

Pada saat melakukan tes, guru dapat menggunakan teknik analisis pola kesalahan siswa baik kesalahan dalam membunyikan huruf maupun merangkaikan kata atau kalimat. Teknik interview dapat digunakan untuk melacak mengapa siswa membunyikan atau membaca seperti itu. Untuk selanjutnya maka dikembangkan satuan layanan bimbingan dan pembelajaran yang diindividual] sasikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil asesmen, maka dikembangkan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Contoh:

Pokok/Subpokok Bahasan	Tujuan Pembelajaran Umum	Tujuan Pembelajaran Khusus
1. Pengenalan bentuk	1.1 Siswa mengetahui klasifikasi benda-benda sekitar	a. Siswa dapat membedakan bentuk lingkaran, segitiga dan segi empat dari kumpulan benda yang disediakan

2. Merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan
 - a. Metode: Tanya jawab, latihan, dan tugas.
 - b. Prosedur kegiatan pembelajaran

Siswa memperhatikan guru tentang uraian tujuan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan

Dengan bimbingan guru siswa melakukan tugas-tugas yang telah disediakan baik melalui contoh/modeling maupun tanpa contoh

Tanpa bimbingan guru siswa melakukan tugas yang sejenis dan bervariasi

3. Menentukan alat evaluasi
 - a. Kumpulkan benda-benda yang berbentuk lingkaran!

- b. Kumpulkan benda-benda yang berbentuk segitiga!
- c. Kumpulkan benda-benda yang berbentuk segiempat!
- 4. Menuangkan poin 1, 2, 3, dan 4 ke dalam format program yang disediakan.
- 5. Berikut disajikan contoh satuan layanan bimbingan yang di individualisasikan dan terpadu dengan program pembelajaran dalam bidang studi pra membaca.

**CONTOH SATUAN LAYANAN BIMBINGAN
(IDENTIFIKASI SISWA)**

Nama Siswa	Aden
Tempat dan tanggal lahir	Bandung,19 Desember 1995
Sekolah	SD Gegerkalong 3 Bandung
Kelas	I (Satu)
Nama Orang Tua	Denny
Alamat	Permata Biru Komplek Z No. 50 Bandung

1. Informasi dari orang tua

selalu menyendiri
bicara tidak lancar
belum dapat mandi dan berpakaian sendiri
takut bila menghadapi situasi baru

2. Informasi dari tim penilai program

hubungan kerjasama kurang
kurang pemusatan perhatian
kurang tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas

3. Perilaku siswa pada awal program

Komunikasi kurang lancar
Kurang mampu mengurus diri
Mampu menyebutkan benda-benda sekitar
Belum mampu membedakan bentuk, warna dan ukuran

4. Komentar dan rekomendasi

perlu mendapat pembinaan bicara, bimbingan, perhatian dan program kesiapan membaca secara khusus yang diawali dari pengenalan bentuk.

5. Tim Penilai Program:

Nama	Jabatan	Tanda tangan
Denny	Orang tua siswa	
Rifky	Kepala Sekolah	
Fitry	Orthopedagog	
Kimmy	Psikolog	
Muhdar	BP	
Shinny	Guru	

**Contoh Program Individualisasi Pembelajaran
Bidang Pengajaran Pra Membaca**

Nama siswa : Aden

Taraf Kemampuan Akademik Siswa saat ME

- mampu menyebutkan benda-benda di sekitar kelas

Tanggal dimulai : 20 November 2003

Tujuan Pembelajaran Umum	Tujuan Pembelajaran Khusus	bahan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Evaluasi	Target pencapaian	Keterangan
Siswa mengetahui klasifikasi benda-benda sekitar	Siswa dapat membedakan benda-benda yang disajikan menurut bentuknya.	penge-nalan bentuk	Pendekatan: Montessori Metode: Tanya jawab, latihan, dan tugas Alat: Bentuk atau bangun-geometri dalam bingkainya. Prosedur Pembelajaran: 1) Dengan menggunakan satu bangun setiap kali, ambil bangun dan bingkainya ke meja siswa, lepaskan bentuk bangun dari bingkainya 2) Dengan cara mengikuti arah jarum jam, telusuri dengan jari telunjuk bagian luar bangun dan sisi bidang dalam bingkainya 3) Katakan kepada siswa, "ini lingkaran", dsb 4) Mintalah kepada siswa untuk menunjukkan benda-benda di sekitarnya yang merupakan lingkaran 5) Lakukan dengan cara demikian untuk bangun-geometri yang lain, dengan menggunakan langkah I std 4, dan menggunakan pembelajaran 3 tahap 6) Tunjukkan kepada siswa bagaimana masing-masing bangun dapat masuk tepat pada bingkainya sendiri 7) Pada langkah terakhir sajikan bangun dan bingkainya secara lengkap, kemudian pindahkan semua bangun, dan mintalah siswa untuk menempatkan kembali dengan tepat.	Kumpulkan benda-benda yang berbentuk lingkaran, dari benda-benda yang disediakan! Kumpulkan benda-benda yang berbentuk segitiga, dari benda-benda yang disediakan! Kumpulkan benda-benda yang berbentuk segiempat dari benda-benda yang disediakan!	27-11-03	
					3-12-03	
					10-12-03	

Pengajar,

Shinny

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A (1996) *Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar*, Jakarta: Depdikbud
- ... (1997) *Menangani Kesulitan Belajar Berhitung*, Jakarta: Depdikbud
- Amstrong, F.,Amstrong,D.,Barton,L.,(2000), *Inclusive Education*. London: David Fulton Pulishers.
- Ashman, A.dan Elkins, J. (Ed) (1994), *Educating Children with Special Needs (Second Ed.)*, Australia : Prantice Hall.
- Berit,H.,Johnsen, & Skjorten,MD., (2001), *Education-Special Needs Education (An Introduction)*., Umpub forlag.
- Dahlan,M.D.(1988), *Posisi Bimbingan dan Penyuluhan Pendidikan dalam Kerangka Ilmu Pendidikan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Pendidikan pa IKIP Bandung tanggal 9 April 1988
- Dali.S.N (1990) *Berhitung Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Gramedia
- Depdikbud (1993) *Kurikulum Pendidikan l)asar ((;BI'')) Muta Pelajaran Matematika Sekolah 1)asar*, Jakarta: Depdikbud
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Iuhun 1989 7entang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasan*, Jakarta : Depdikbud.
- (199311994), *Jabatan h'ungsional Guru dan Angka Kreditnya*, Jakarta Depdikbud.
- ... , (1999). *Pedoman Bimbingan di Sekolah Luar Biasa*, Jakarta : Depdikbud.
- (1999), *Pedoman Penilaian dan Kegiatan dan Hasil Belajar di Sekolah Luar Biasa*, Jakarta : Depdikbud
- Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *KebAakan 1)irektorat PLB tentang Lavanan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Pendidikan Khusus*, Jakarta: Depdiknas.

- (2002), *Kompetensi Pendidikan Luar Biasa Masa Depan*, Makalah disampaikan dalam semiloka UPI Bandung 7 Agustus 2002 oleh Direktur Tenaga Kependidikan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Glanz,C.A (1964), *Foundations and Principles of Guidance*, USA: Allyn and Bacon Inc.
- Greenspan,SI., Wieder,S.,(1998), *The Child with Special Needs (Encouraging Intellectual and Emotional Growth)*, NY: Perseus Books.
- Hallahan,DP.,& Kauffman,JM.,(1986), *Exceptional Children (Introduction to Special Education)*, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Kirk,SA.,& Gal lagher,JJ.,(1986), *Educating Exceptional Children*, USA: Houghton Mifflin Company.
- Lynch, James.,(1994), *Provisioan for Children with Special Educational Needs in the Asia Region*, USA: The World Bank.
- Makmun, A.S.(1981), *Psikologi Kependidikan*, Bandung: IKIP
- Marozas, S.D. and May,C.D. (1988) *Issues and Practices in Special Education*, New York: Longman Inc.
- Nasichin (2001), *Peranan Pemerintah dalam Membuat Kebijakan dan Mengimplementasikannya.*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Mewujudkan Kemandirian Penyandang Tunagrahita" 6 Oktober 2001 di Grand Hotel Preanger.
- Nawawi,A (1998), *Penyelenggaraan Program Pendidikan ierpadu bagi Anak Berkelainan.*, Makalah disajikan dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Natawidjaja,R.(1988), *Peranan Guru dalam Bimbingan di Sekolah*, Bandung: Abardin
- Pijl,SJ.,Meijer, CJW.,Hegarty,S.,(1997)., *Inclusive Education.*, NY: Routledge.
- Stout, S. K. (1999), *Education Inclusion*, Tersedia: wysiwyg./ /8/ <http://www.weac.org/resource/june96/speced.htm> (4 Maret 2000)

- Suhaeri, H.N., (1996), *Bimbingan Konseling Anak Luar Biasa*, Jakarta Depdikbud.
- Sunanto,J.(2000)., *Mengharap Pendidikan Inklusi. (Menemukan Model Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Umum)*, Makalah yang disampaikan dalam diskusi panel pada tanggal 13 September 2000 di Balai Pertemuan UPI Bandung.
- Sunardi, (2002), *Pendidikan Inklusif.' Prakondisi dan implikasi Managerialnya*, Makalah yang disampaikan pada Temu Ilmiah PLB Tingkat Nasional di Bandung tanggal 6 sd.8 agustus 2002
- Supriadi, D., (1997), *Profesi Konseling dan Keguruan (dilengkapi dengan bahan-bahan dari hasil Internet Search)*, Bimbingan dan Penyuluhan PPS dan PPB FIP IKIP Bandung.
- Tarsidi,D.(Alih Bahasa) (2000)., *Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus.*, Jakarta:Braillo Norway. Judul asl "The Salamanca Statement and Framework for Action, Salamanca, Spain, 7-10 Juni 1994.
- Tarver,BS., Spagna,ME., Sullivan,J.,(1998)., *School Counselors and Full Inclusion for Children With Special Needs.*, Journal (Professional School Counseling) Volume 1 no.3 p.51-56 February 1998., ASCA.